

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
(Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Surabaya II)**

Disusun Oleh :
Fitri Rahmayati
NIM. 0910232014

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Ekonomi*



JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2012

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
(Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Surabaya II)**

Yang disusun oleh :

Nama : Fitri Rahmayati

NIM : 0910232014

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

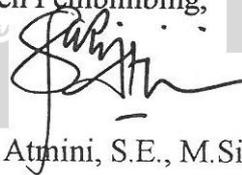
Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Malang, 19 Januari 2012

Dosen Pembimbing,



Sari Atmuni, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 197206111997022001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
(Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Surabaya II)**

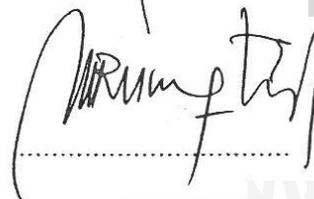
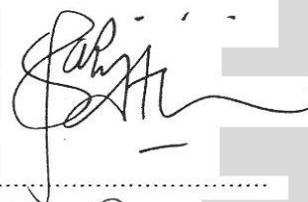
Yang disusun oleh:

Nama : Fitri Rahmayati
NIM : 0910232014
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

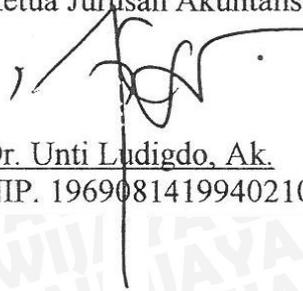
Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 7 Februari 2012 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Susunan Dewan Penguji

1. Sari Atmini, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197206111997022001
(Dosen Pembimbing/Dosen Penguji I)
2. Lutfi Harris, S.E., M.Ak., Ak.
NIP. 197806212005011003
(Dosen Penguji II)
3. Arum Prastiwi, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 196707142005012001
(Dosen Penguji III)



Malang, 7 Februari 2012
Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. Unti Ludigdo, Ak.
NIP. 196908141994021001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Rahmayati
NIM : 0910232014
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul :

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
(Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Surabaya II)**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila di kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 19 Januari 2012

Pembuat Pernyataan,

METERAI
TEMPEL
PAJAK MENANGGUNG BANGSA
TGL 19-01-2012

BFF46AAF916958160

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP

Fitri Rahmayati
NIM. 0910232014



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II

GEDUNG KEUANGAN NEGARA II Jalan Dinoyo no. 111 Surabaya
Telepon : (031) 5615394, 5615393
Faksimili : (031) 5615394 Situs : www.kppnsurabaya2.net

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET - 697 WPB.16/KP.135/2012

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Edison Tampubolon
NIP. : 195711011985031002
Pangkat/(Gol) : Pembina (IV/A)
Jabatan : Kepala KPPN Surabaya II

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul :

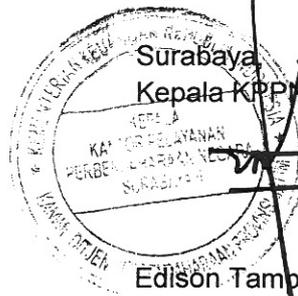
**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
(Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Surabaya II)**

Yang disusun oleh :

Nama : Fitri Rahmayati
NIM : 0910232014
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik

Telah dilakukan di KPPN Surabaya II pada tanggal 2 s.d 9 Desember 2011, dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada staf satuan kerja dalam wilayah pembayaran KPPN Surabaya II yang datang saat melaksanakan rekonsiliasi data laporan keuangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, Januari 2012
Kepala KPPN,

Edison Tampubolon |
NIP. 195711011985031002

RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitri Rahmayati

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya / 15 Oktober 1984

Agama : Islam

Status : Menikah

Alamat Rumah : Jl. Mleto No. 2A Surabaya

Alamat Email : fitri.rahmayati@gmail.com

Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar (1991-1997) : SDN Kertajaya XII/218 Surabaya

SLTP (1997-2000) : SLTP Negeri 1 Surabaya

SMU (2000-2003) : SMU Negeri 5 Surabaya

Perguruan Tinggi (2003-2006) : DIII Keuangan Spesialisasi Kebendaharaan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta

(2009-2012) : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Riwayat Pekerjaan :

(2007 - sekarang) : Pelaksana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Amlapura, Karangasem-Bali.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu wa Ta'ala karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Surabaya II)” ini dengan baik. Semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa Sallam yang telah membimbing kita menuju terangnya cahaya Islam.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan, semangat, dan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis dalam rangka penyelesaian studi ini. Secara khusus, ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Gugus Irianto, Ph.D, Ak., CPA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang,
2. Bapak Dr. Unti Ludigdo, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang,
3. Ibu Sari Atmini, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing/dosen penguji I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis guna menyelesaikan skripsi ini,
4. Bapak Lutfi Harris, S.E., M.Ak., Ak. selaku dosen penguji II,
5. Ibu Arum Prastiwi, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen penguji III,
6. Seluruh staf pengajar/dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya selama program studi berlangsung,
7. Seluruh staf jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan dan penelitian,

8. Para pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang telah memberikan beasiswa secara penuh dan mendorong peningkatan kompetensi para pegawai,
9. Bapak Edison Tampubolon selaku Kepala KPPN Surabaya II beserta staf yang telah memberikan data-data yang diperlukan, tempat, serta memfasilitasi penyebaran kuesioner penelitian ini,
10. Segenap operator SAKPA/staf penyusun laporan keuangan satuan kerja yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini,
11. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moral bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi,
12. Teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bertukar pikiran dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan penelitian.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik membangun untuk perbaikan ke depan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi organisasi dan perkembangan dunia pendidikan dan pengetahuan pada umumnya.

Malang, 7 Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	11
2.1 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga	11
2.1.1 Tujuan dan Manfaat.....	11
2.1.2 Komponen Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga	13
2.1.3 Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga	16
2.1.4 Prosedur Penyampaian Laporan Keuangan di Tingkat KPPN.....	17
2.2 Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.....	18
2.2.1 Pengukuran Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga	18
2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.....	20
2.3 Pengembangan Hipotesis	27
2.3.1 Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga	27
2.3.2 Aturan Hukum dan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga	28

2.3.3 Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja dan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga	29
2.3.4 Organisasi Tim dan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga	30
2.3.5 Sarana Pendukung dan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga	31
2.4 Kerangka Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Populasi dan Sampel.....	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	34
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	35
3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian	35
3.5.1 Variabel Terikat / <i>Dependent Variable</i>	36
3.5.2 Variabel Bebas / <i>Independent Variable</i>	37
3.6 Uji Instrumen Penelitian	41
3.7 Uji Kualitas Data.....	43
3.7.1 Uji Validitas	43
3.7.2 Uji Reliabilitas	43
3.8 Metode Analisis Data	44
3.8.1 Uji Asumsi Klasik	44
3.8.2 Pengujian Hipotesis	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	47
4.2 Gambaran Umum Responden	49
4.3 Statistik Deskriptif.....	51
4.3.1 Variabel Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).....	51
4.3.2 Variabel Aturan Hukum (ATR)	53
4.3.3 Variabel Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja (KMN)	54
4.3.4 Variabel Organisasi Tim (ORG)	55
4.3.5 Variabel Sarana Pendukung (SRN).....	56

4.3.6 Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	57
4.4 Hasil Uji Instrumen Penelitian.....	58
4.4.1 Hasil Uji Validitas.....	59
4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas.....	60
4.5 Uji Kualitas Data.....	61
4.5.1 Uji Validitas.....	61
4.5.2 Uji Reliabilitas.....	64
4.6 Uji Asumsi Klasik.....	65
4.6.1 Uji Normalitas.....	65
4.6.2 Uji Multikolinieritas.....	66
4.6.3 Uji Heteroskedastisitas.....	67
4.7 Pengujian Hipotesis.....	68
4.7.1 Pengujian Hipotesis 1.....	69
4.7.2 Pengujian Hipotesis 2.....	69
4.7.3 Pengujian Hipotesis 3.....	70
4.7.4 Pengujian Hipotesis 4.....	70
4.7.5 Pengujian Hipotesis 5.....	71
4.8 Model Regresi yang Terbentuk.....	71
4.9 Pembahasan Hasil Penelitian.....	72
4.9.1 Kemampuan Sumber Daya Manusia.....	72
4.9.2 Aturan Hukum.....	74
4.9.3 Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja.....	75
4.9.4 Organisasi Tim.....	76
4.9.5 Sarana Pendukung.....	76
BAB V PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Keterbatasan.....	78
5.3 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81



DAFTAR TABEL

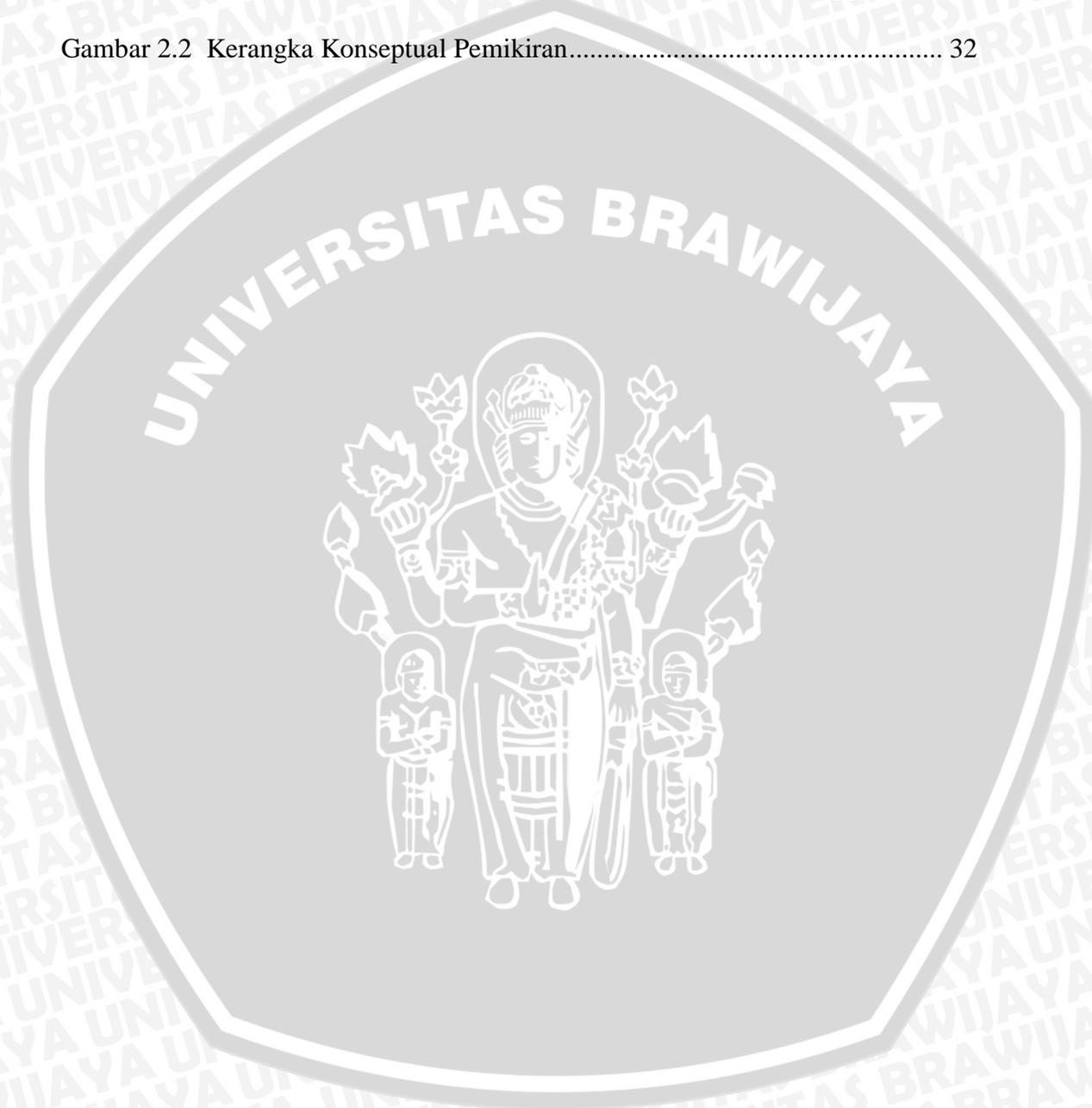
Tabel 3.1	Skor Frekuensi Penerimaan ADK.....	37
Tabel 4.1	Gambaran Umum Responden.....	50
Tabel 4.2	Hasil Kuesioner Variabel Kemampuan Sumber Daya Manusia.....	52
Tabel 4.3	Hasil Kuesioner Variabel Aturan Hukum.....	53
Tabel 4.4	Hasil Kuesioner Variabel Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja.....	54
Tabel 4.5	Hasil Kuesioner Variabel Organisasi Tim.....	55
Tabel 4.6	Hasil Kuesioner Variabel Sarana Pendukung.....	56
Tabel 4.7	Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	58
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas pada Uji Pilot.....	59
Tabel 4.9	Hasil Uji Reliabilitas pada Uji Pilot.....	60
Tabel 4.10	Hasil Uji Validitas Variabel Kemampuan Sumber Daya Manusia....	61
Tabel 4.11	Hasil Uji Validitas Variabel Aturan Hukum.....	62
Tabel 4.12	Hasil Uji Validitas Variabel Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja.....	63
Tabel 4.13	Hasil Uji Validitas Variabel Organisasi Tim.....	63
Tabel 4.14	Hasil Uji Validitas Variabel Sarana Pendukung.....	64
Tabel 4.15	Hasil Uji Reliabilitas.....	64
Tabel 4.16	Hasil Uji Normalitas.....	65
Tabel 4.17	Hasil Uji Multikolinieritas.....	66
Tabel 4.18	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	67
Tabel 4.19	Hasil Uji Hipotesis.....	68



DAFTAR GAMBAR

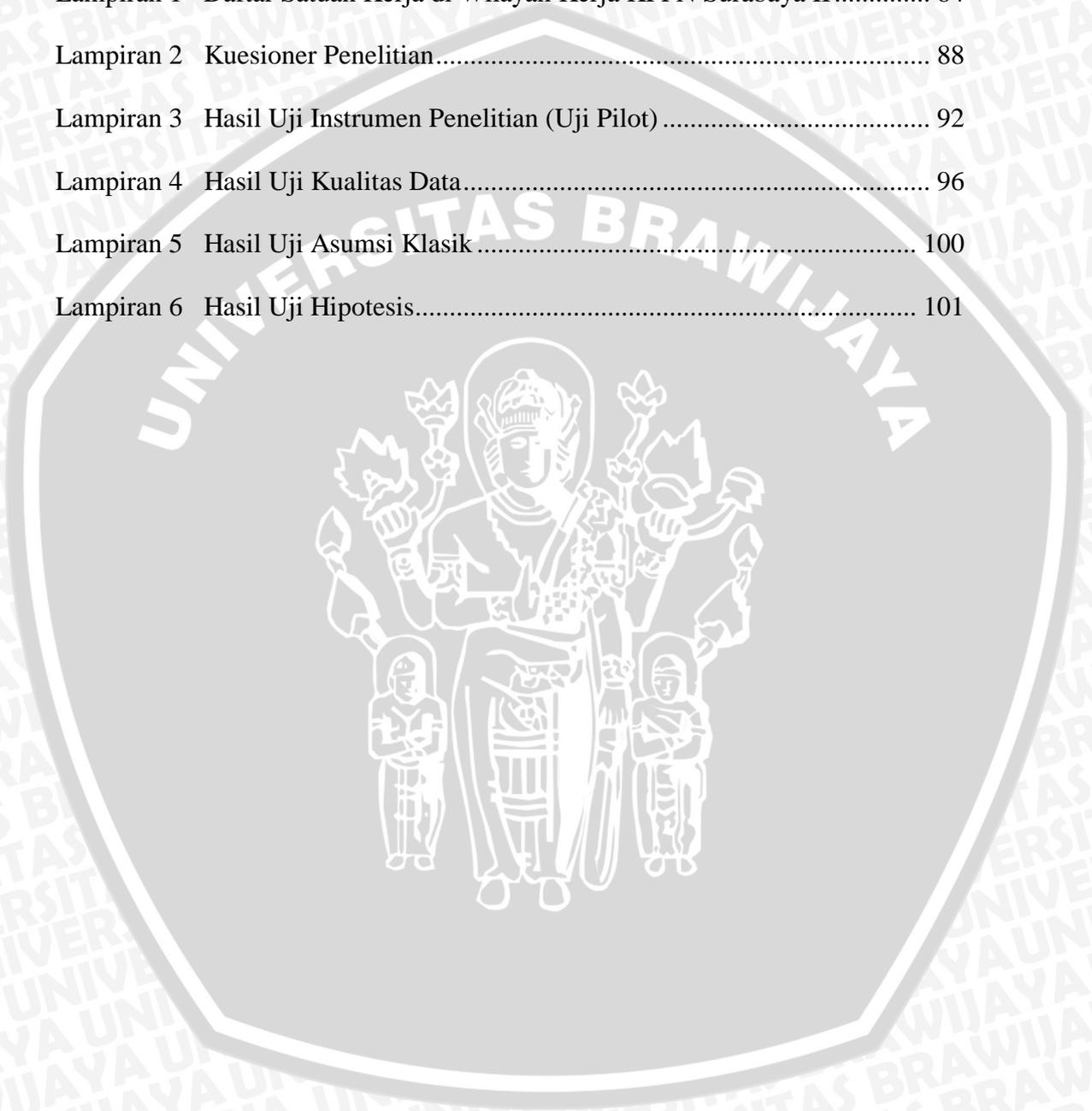
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran..... 24

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Pemikiran..... 32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Surabaya II.....	84
Lampiran 2	Kuesioner Penelitian.....	88
Lampiran 3	Hasil Uji Instrumen Penelitian (Uji Pilot)	92
Lampiran 4	Hasil Uji Kualitas Data.....	96
Lampiran 5	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	100
Lampiran 6	Hasil Uji Hipotesis.....	101



ABSTRAK**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
(Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Surabaya II)**

Oleh:
Fitri Rahmayati

Dosen Pembimbing:
Sari Atmini, S.E., M.Si., Ak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga tingkat satuan kerja. Penelitian ini terdorong masih banyaknya laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang belum mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian setelah lima tahun penerapan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian ini dilakukan terhadap satuan kerja yang berada di wilayah kerja KPPN Surabaya II. Variabel independen yakni kemampuan sumber daya manusia, aturan hukum, komunikasi antara KPPN dengan satuan kerja, organisasi tim, dan sarana pendukung diteliti menggunakan instrumen berupa kuesioner, sedangkan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen diukur berdasarkan ketepatan waktu dan jumlah revisi yang dilakukan satuan kerja terhadap laporan keuangan yang datanya diperoleh dari KPPN Surabaya II.

Data kuesioner diperoleh dari 75 operator SAKPA/staf penyusun laporan keuangan satuan kerja. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil statistik mengindikasikan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan adalah faktor kemampuan sumber daya manusia dan organisasi tim. Sedangkan faktor aturan hukum, komunikasi antara KPPN dengan satuan kerja, dan sarana pendukung, tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: kualitas laporan keuangan, kemampuan sumber daya manusia, aturan hukum, komunikasi, organisasi tim, sarana pendukung.

ABSTRACT**FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF
FINANCIAL STATEMENT OF STATE MINISTRY/INSTITUTION
(Study on Working Units in KPPN Surabaya II's Working Area)****By:
Fitri Rahmayati****Advisor Lecturer:
Sari Atmini, S.E., M.Si., Ak.**

The purpose of this research is to analyze factors affecting the quality of financial statement of State Ministry/Institution at working unit level. This study was motivated by there are many financial statement of State Ministry/Institution that haven't received unqualified opinion after five years application of PP 24 of 2005 about Government Accounting Standards.

This research is conducted on working units in KPPN Surabaya II's working area. Independent variables which consist of human resources ability, rule of law, communication between KPPN with working unit, team organization, and supporting facilities, were examined using a questionnaire instrument, while quality of financial statement as dependent variable were measured based on timeliness and number of financial statement's revisions that carried out by working unit which the data obtained from KPPN Surabaya II.

Questionnaire data were obtained from 75 SAKPA's operator/staff making up the financial statements of working units. Multiple linier regression analysis was applied to analyze the data. The statistical results indicate that factors affecting the quality of financial statement are human resource ability and team organization. While the rule of law, communication between KPPN with working unit, and supporting facilities, are not affecting the quality of financial statement.

Key words: *quality of financial statement, human resources ability, the rule of law, communication, team organization, supporting facilities.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas audit yang dilakukan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009 dan 2010, cukup membawa angin segar bagi pengelola keuangan negara. Bagaimana tidak, selama beberapa tahun sebelumnya, LKPP selalu mendapat opini *disclaimer* dari BPK RI. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya keras pemerintah dalam membenahi sistem pengelolaan keuangan negara, mulai membuahkan hasil. Pembenahan dilakukan dalam berbagai cara. Mulai reformasi birokrasi, pembaharuan bagan akun standar, sampai pada upaya untuk mulai mencatat sebagian akun seperti pendapatan dan belanja menggunakan basis akrual.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pun turut berbenah. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang di dalamnya lebih mengatur mengenai implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual, meski sebagian masih menggunakan basis kas menuju akrual karena memang belum memungkinkan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan

agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu (KSAP, 2005) :

- a) Relevan, yang berarti informasi harus memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu, dan lengkap
- b) Andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), dan netralitas
- c) Dapat dibandingkan, yang berarti laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.
- d) Dapat dipahami, berarti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dalam rangka memenuhi kriteria kualitatif laporan keuangan tersebut, pemerintah pusat mengembangkan sebuah Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). SAPP akan menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK RI sebelum diserahkan ke DPR. SAPP terdiri dari dua subsistem yaitu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SA-BUN akan menghasilkan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Sedangkan SAI menghasilkan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu, kualitas LKPP dipengaruhi oleh implementasi SA-BUN dan SAI, karena pada

dasarnya LKPP merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). Dengan kata lain, kualitas LKKL turut menentukan kualitas LKPP.

Kualitas LKKL secara umum tercermin dalam pemberian opini oleh BPK RI atas hasil auditnya. Berdasarkan siaran pers BPK RI tanggal 1 Juni 2011, dapat disimpulkan bahwa opini atas LKKL menunjukkan kemajuan yang signifikan. Jumlah Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI telah meningkat dengan pesat, dari 35 pada tahun 2008, menjadi 45 pada tahun 2009, dan tahun 2010 sebanyak 53 K/L. Opini atas LKKL tersebut diberikan BPK RI terhadap kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (www.bpk.go.id).

Meski demikian, Wakil Presiden Budiono menyatakan kurang puas dengan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, meskipun kecenderungannya semakin membaik. Hal ini karena dari 84 K/L dan 466 pemerintah daerah (pemda), baru 53 K/L dan 32 pemda yang mendapat opini WTP. Boediono menambahkan, setidaknya perlu tiga hal bagi K/L dan pemda untuk menghasilkan laporan keuangan yang WTP, yaitu : (1) komitmen yang kuat dari para pimpinan instansi, terutama yang laporan keuangannya belum WTP, untuk mencapai tingkat sasaran *good governance* yang diinginkan pemerintah; (2) perlu rencana aksi yang jelas dari setiap K/L dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta memperbaiki pelaporan keuangannya; dan (3) setiap instansi pemerintah pusat maupun daerah perlu

membuat tim khusus yang fokus menjalankan rencana aksi perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Bisnis Indonesia, 2011).

Salah satu faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya kualitas LKKL adalah sumber daya manusia yang terbatas. Hal ini diungkapkan Vincentius Sonny Loho, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai standar akuntansi pemerintah merupakan masalah klasik yang selama ini menghambat perbaikan kualitas pelaporan keuangan K/L. Upaya konkrit untuk mengatasinya adalah dengan mengadakan pelatihan guna menciptakan tenaga-tenaga akuntan yang berkualitas di instansi-instansi pemerintah. Namun, upaya ini tentu memerlukan waktu yang cukup lama, mengingat beberapa tahun terakhir terjadi penambahan sekitar 2.000 satuan kerja (Bisnis Indonesia, 2011).

Selain sumber daya manusia, faktor lain yang juga penting adalah aturan hukum. Adanya aturan yang jelas, mudah dipahami, dan mudah diikuti akan mendukung kelancaran penyusunan laporan keuangan. Mahardika (2011) menyebutkan bahwa aturan diperlukan agar penyusunan laporan keuangan dapat berjalan lebih terarah dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Komunikasi antara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan satuan kerja sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan LKPP tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)-KPPN, juga memegang peranan penting dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini terlihat dari semakin komunikatifnya *website-website* yang dimiliki oleh KPPN yang memungkinkan pengguna (satuan kerja) dalam mengakses informasi atau

menanyakan jalan keluar atas permasalahan yang ditemui. Beberapa *website* bahkan dilengkapi dengan fasilitas *live chat*.

Selain itu, di tingkat pusat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga tengah mempersiapkan para Penyuluh Perbendaharaan. Terkait hal ini, Direktur Sistem Perbendaharaan, Abdul Rahman Ritonga, dalam acara Pembekalan Angkatan I Penyuluh Perbendaharaan menyatakan bahwa Penyuluh Perbendaharaan adalah corong *transfer knowledge* kepada *stakeholders* (www.perbendaharaan.go.id). *Stakeholders* yang dimaksud di antaranya adalah pihak Kementerian Negara/Lembaga.

Faktor lain yang tak kalah penting adalah adanya organisasi tim dalam penyusunan laporan keuangan. Choirunisah (2009) menyatakan bahwa tidak berfungsinya pengorganisasian tim dalam pelaksanaan kerja dapat menimbulkan penurunan kinerja yang berdampak pada penurunan kualitas informasi yang dihasilkan. Penurunan kinerja terlihat dalam hal keterlambatan penyampaian laporan keuangan atau informasi yang disajikan tidak lengkap sehingga informasi dalam laporan keuangan tidak memiliki manfaat umpan balik dan manfaat prediktif.

Selain keempat faktor tersebut, faktor lain yang turut berperan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas adalah sarana pendukung berupa program aplikasi yang memadai dan perangkat keras (*hardware*) yang canggih. Mahardika (2011) berpendapat bahwa dengan bantuan aplikasi dan komputer, penyusunan laporan keuangan akan lebih mudah, cepat, dan tepat sehingga laporan keuangan dapat tersedia saat dibutuhkan.

Berdasarkan penjelasan faktor-faktor tersebut, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga tingkat satuan kerja. Penelitian ini mengacu pada tiga penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Choirunisah (2009), Warisno (2009), dan Mahardika (2011). Hasil penelitian Choirunisah (2009) menyebutkan bahwa dari lima faktor yang diuji, yakni kemampuan sumber daya manusia, dukungan pimpinan dan alat, fasilitas, organisasi tim, dan sistem pengendalian, hanya faktor kemampuan sumber daya manusia dan organisasi tim yang berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Kemudian, dari hasil penelitian Warisno (2009) diperoleh bukti bahwa dari empat faktor yang diuji, yakni kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi, hanya faktor kualitas sumber daya manusia dan komunikasi yang berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja dalam pengelolaan keuangan daerah, yang salah satunya diproksikan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil penelitian berikutnya, yakni penelitian Mahardika (2011), menunjukkan bahwa dari lima faktor yang diuji, yakni sumber daya manusia, pelatihan, motivasi, peraturan, dan sarana pendukung, ada tiga faktor yang memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, yaitu faktor sumber daya manusia, peraturan, dan sarana pendukung.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada pemilihan variabel independen yang digunakan, yaitu kemampuan sumber daya

manusia, aturan hukum, komunikasi, organisasi tim, dan sarana pendukung, yang pada penelitian sebelumnya merupakan variabel yang berpengaruh positif dan signifikan. Persamaan lainnya terletak pada komponen penilaian kualitas laporan keuangan, yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini variabel komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi antara KPPN dengan satuan kerja, bukan komunikasi internal satuan kerja seperti pada penelitian Warisno (2009). Penelitian ini menggunakan tipe komunikasi yang berbeda karena penelitian ini difokuskan pada kualitas laporan keuangan satuan kerja sebagai komponen LKPP yang disusun KPPN, sedangkan Warisno (2009) mengulas kinerja pengelolaan keuangan secara keseluruhan, yakni sejak anggaran disusun sampai dengan penyampaian laporan keuangan.

Selain itu, penilaian kualitas laporan keuangan tidak didasarkan pada karakteristik kualitatif yang ditetapkan dalam SAP seperti dalam penelitian Choirunisah (2009), melainkan didasarkan pada ketepatan waktu dan frekuensi diterimanya arsip data komputer (ADK) laporan keuangan satuan kerja pada Aplikasi Verifikasi dan Akuntansi (Aplikasi Vera) KPPN saat pelaksanaan rekonsiliasi, yang digunakan sebagai indikator banyaknya revisi yang dilakukan satuan kerja terhadap laporan keuangan sebelum didapatkan hasil rekonsiliasi yang sama.

Perbedaan lainnya terletak pada obyek penelitian. Jika Choirunisah (2009) meneliti satuan kerja di wilayah kerja KPPN Malang, Warisno (2009) meneliti satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi,

dan Mahardika (2011) meneliti SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang, maka penelitian ini akan meneliti satuan kerja di wilayah kerja KPPN Surabaya II.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang ditulis dalam skripsi dengan judul : **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Surabaya II)”**

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan yang meliputi :

1. Apakah kemampuan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga?
2. Apakah aturan hukum berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga?
3. Apakah komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga?
4. Apakah organisasi tim berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga?
5. Apakah sarana pendukung berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil objek penelitian pada satuan kerja yang berada pada wilayah kerja KPPN Surabaya II. Kualitas laporan keuangan yang dimaksud dalam laporan ini hanya difokuskan pada ketepatan

waktu penyampaian laporan keuangan dan frekuensi penerimaan ADK laporan keuangan satuan kerja pada Aplikasi Vera KPPN sampai hasil rekonsiliasi dinyatakan sama.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menemukan bukti empiris adanya pengaruh :

1. Kemampuan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
2. Aturan hukum terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
3. Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
4. Organisasi tim terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
5. Sarana pendukung terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kalangan Akademisi

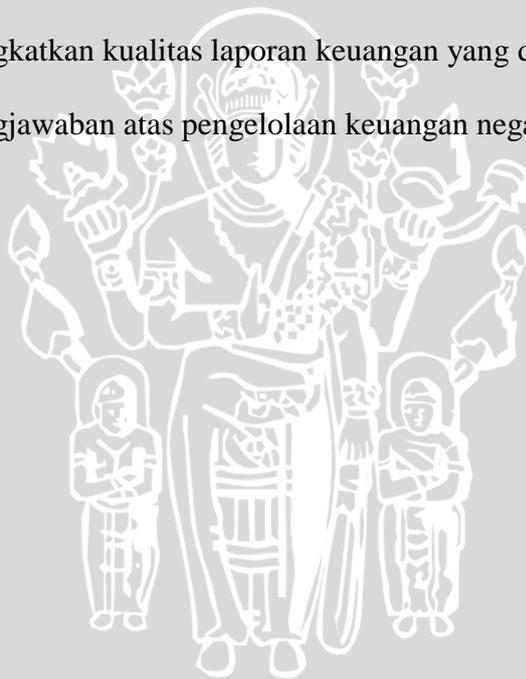
Penelitian ini memperluas wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Kementerian Negara/Lembaga tingkat satuan kerja yang merupakan komponen dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tingkat Kuasa BUN KPPN.

2. Bagi Pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Pejabat KPPN Surabaya II khususnya

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan peran KPPN sebagai penyuluh yang memberikan bimbingan kepada satuan kerja agar dapat bersinergi dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah pusat yang lebih berkualitas.

3. Bagi Satuan Kerja di wilayah kerja KPPN Surabaya II

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi satuan kerja untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara.



BAB II

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Format laporan keuangan ini mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan dalam penyusunannya dibantu program aplikasi yang disebut Sistem Akuntansi Instansi.

2.1.1 Tujuan dan Manfaat

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Untuk memenuhi tujuan tersebut, PSAP 01 paragraf 11 menyebutkan bahwa laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal (KSAP, 2005) :

- a. Aset,

- b. Kewajiban,
- c. Ekuitas Dana,
- d. Pendapatan,
- e. Belanja,
- f. Transfer, dan
- g. Pembiayaan.

Laporan keuangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Negara/Lembaga, digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga juga bermanfaat dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Hal ini karena laporan keuangan, sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual SAP paragraf 23, menyediakan informasi mengenai (KSAP, 2005) :

- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Cara entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- e. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pajak dan pinjaman.
- f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.2 Komponen Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran

Dalam PSAP 02 paragraf 6 disebutkan bahwa laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya. Laporan realisasi anggaran berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran (KSAP, 2005).

2) Neraca

Kerangka konseptual SAP paragraf 59 menyatakan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Penjelasan dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut (KSAP, 2005) :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana dapat dikelompokkan ke dalam ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana

cadangan. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Sedangkan ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar para pengguna mudah memahami dan menghindarkan terjadinya kesalahpahaman karena laporan keuangan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Dalam kerangka konseptual SAP paragraf 75 disebutkan bahwa catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut (KSAP, 2005) :

- a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya.

- d. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- e. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.3 Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang merupakan bagian dari LKPP, dalam penyusunannya harus mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang juga telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dihasilkan dari tiap-tiap unit kerja di bawahnya, yang terdiri dari :

1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA),
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1),
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) dan
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

Tiap-tiap unit kemudian akan memberikan laporan keuangannya secara berjenjang ke unit akuntansi di atasnya secara periodik, setelah melalui proses rekonsiliasi dengan unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada masing-

masing tingkat. Untuk satuan kerja yang merupakan UAKPA, rekonsiliasi dilakukan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulannya untuk menjamin akurasi data yang dihasilkan. KPPN merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setelah melalui proses rekonsiliasi, laporan keuangan dari seluruh satuan kerja tersebut akan dikonsolidasi oleh KPPN menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tingkat Kuasa BUN-KPPN.

2.1.4 Prosedur Penyampaian Laporan Keuangan di Tingkat KPPN

Pada Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-19/PB/2008 tentang Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dijelaskan mengenai prosedur penyampaian laporan keuangan di tingkat KPPN sebagai berikut :

- 1) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) wajib menyampaikan laporan keuangan setiap bulan ke KPPN berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Arsip Data Komputer (ADK).
- 2) Laporan keuangan yang disampaikan harus dilampiri bukti Register Pengiriman Laporan Keuangan bulan sebelumnya ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1)
- 3) Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA ke KPPN selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir sebagai bahan

rekonsiliasi data dan pengawasan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.2 Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) turut menentukan kualitas LKPP. Hal ini karena sebagian besar komponen LKPP, yakni laporan realisasi anggaran dan neraca, merupakan hasil konsolidasi seluruh LKKL, sedangkan sisanya merupakan laporan arus kas yang disusun oleh Bendahara Umum Negara.

2.2.1 Pengukuran Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Sejalan dengan implementasi pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* pada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan beberapa manual Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur kinerja pada KPPN. Di antaranya pada perspektif *stakeholders*, terdapat indikator mengenai nilai kualitas LKPP Kuasa BUN KPPN. Di dalamnya disebutkan bahwa kualitas LKPP ditentukan berdasarkan tiga kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :

1) Tepat waktu

Nilai ketepatan waktu: setiap hari keterlambatan pengiriman LKPP Kuasa BUN KPPN ke Kantor Pusat akan mengurangi nilai sebanyak lima angka (tepat waktu dinilai 100).

2) Rekonsiliasi data sama/tingkat akurasi

Nilai akurasi: perbandingan antara jumlah satuan kerja yang melaksanakan rekonsiliasi sesuai batasan waktu yang ditetapkan peraturan (sampai dengan

tujuh hari kerja setelah bulan bersangkutan) dengan jumlah seluruh satuan kerja dikalikan 100.

3) Kelengkapan unsur laporan keuangan

Kelengkapan LKPP dinilai 100 apabila memenuhi lima unsur, yakni Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan atas Laporan Keuangan, Rekening Koran, dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara. Setiap unsur bernilai 20.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tingkat Kuasa BUN KPPN merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga tingkat satuan kerja sehingga kualitas laporan keuangan satuan kerja juga menentukan baik buruknya kualitas LKPP yang disusun oleh KPPN. Oleh karena itu, tiga kriteria di atas juga dapat diterapkan dalam menilai kualitas laporan keuangan satuan kerja, namun yang dijadikan tolok ukur utama adalah kriteria ketepatan waktu. Hal ini karena satuan kerja, baru dicatat telah menyampaikan laporan keuangan (yang ditandai dengan penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi oleh KPPN) setelah hasil rekonsiliasi dinyatakan sama dan semua unsur-unsurnya telah lengkap.

Selain berdasarkan ketepatan waktu, pengukuran kualitas LKPP tingkat satuan kerja juga akan mempertimbangkan faktor arsip data komputer (ADK) laporan keuangan satuan kerja yang disampaikan kepada KPPN untuk proses rekonsiliasi data. ADK ini merupakan *file* yang terbentuk dari Aplikasi SAKPA yang dijalankan satuan kerja dalam menyusun laporan keuangan.

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Tingkat ketepatan waktu dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor berikut ini diduga telah memberikan kontribusi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.2.2.1 Kemampuan Sumber Daya Manusia

Menurut Susilo (2002:3) dalam Aritonang dan Syarief (2009), sumber daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi dan tujuannya. Sementara McLeod (1996) dalam Mahardika (2011) berpendapat bahwa personil merupakan salah satu sumber daya fisik yang mengalir melalui perusahaan, dan departemen sumber daya manusia berperan penting dalam arus tersebut.

Kemampuan sumber daya manusia diartikan sebagai kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya terdiri dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik (Robbins, 2006:52). Dalam pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu organisasi, kemampuan intelektual tentu lebih dominan. Kemampuan intelektual seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya.

Latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan

sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau setidaknya memiliki pengalaman di bidang keuangan sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan. Namun akhir-akhir ini terdapat permasalahan terkait latar belakang pendidikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Masalah-masalah tersebut adalah belum dimilikinya atau kurangnya sumber daya manusia berlatar pendidikan akuntansi, belum ada kebijakan rekrutmen pegawai berlatar belakang akuntansi, dan adanya anggapan bahwa sumber daya manusia yang bukan berlatar belakang akuntansi mampu melaksanakan tugas dengan modal pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bimbingan (Nazier, 2009).

2.2.2.2 Aturan Hukum

Aturan adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya diturut, atau peraturan adalah tindakan/perbuatan yang harus dijalankan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002). Jadi, keberadaan aturan merupakan faktor penting dalam mengarahkan setiap tindakan seseorang atau sekelompok orang, termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan.

Adanya aturan hukum, khususnya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan, yang memberikan pedoman tentang tatacara penyusunan laporan keuangan akan memudahkan penyusun laporan dan menyediakan standar baku dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar setiap instansi memiliki bentuk laporan keuangan yang serupa sehingga dapat dibandingkan dan dikonsolidasi menjadi LKPP.

2.2.2.3 Komunikasi Antara KPPN dengan Satuan Kerja

Herbert (1981) dalam Suranto (2005) dalam Warisno (2009) mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang di dalamnya terdapat perpindahan pengetahuan dari seseorang kepada orang lain dengan maksud mencapai beberapa tujuan khusus. Sedangkan Robbins (2006:392) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian dan pemahaman makna. Sehebat apapun gagasan, tidak akan berguna jika tidak diteruskan ke dan dipahami orang lain. Komunikasi yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi efektivitas kelompok atau organisasi manapun.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga secara keseluruhan, komunikasi berjalan baik secara internal maupun eksternal organisasi. Komunikasi secara internal dilakukan antar unit akuntansi dalam Kementerian Negara/Lembaga, mulai tingkat paling bawah (satuan kerja/UAKPA) dan berlanjut hingga tingkat paling atas (Kementerian Negara/Lembaga/UAPA).

Sedangkan komunikasi secara eksternal adalah komunikasi antara Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Anggaran dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara yang dilakukan pada setiap tingkat untuk melaksanakan rekonsiliasi data. Pada tingkat paling bawah, rekonsiliasi data laporan keuangan dilakukan oleh pihak satuan kerja dengan KPPN. Satuan kerja wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (tingkat satuan kerja), serta melakukan proses rekonsiliasi dengan KPPN. Kemudian, KPPN akan

mengkonsolidasi seluruh laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (tingkat satuan kerja) tersebut menjadi LKPP tingkat Kuasa BUN-KPPN sehingga diperlukan komunikasi yang baik diantara keduanya untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

Komunikasi dalam organisasi dewasa ini juga kerap ditingkatkan dan diperkaya oleh teknologi yang dibantu komputer. Komunikasi ini mencakup surat elektronik (*email*), hubungan intranet dan ekstranet (*internet*), serta konferensi video (Robbins, 2006:403). Beberapa Kementerian Negara/Lembaga telah mengembangkan pelaporan sistem akuntansi instansi (SAI) berbasis *web* untuk mempermudah pelaporan dari tiap unit akuntansi. Misalnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, andal, cepat, tepat waktu dan akuntabel, serta untuk mencapai peningkatan opini laporan keuangan (www.sai.kkp.go.id, www.kemdiknas.go.id).

Sarana komunikasi dengan bantuan komputer ini turut pula menjembatani hubungan KPPN dan satuan kerja, yang saat ini didominasi komunikasi melalui *website* KPPN dalam penyampaian informasi-informasi penting terkait peraturan maupun pengumuman lainnya. Tentunya sarana komunikasi lain juga masih digunakan, seperti telepon, surat pos, atau berkunjung langsung ke KPPN.

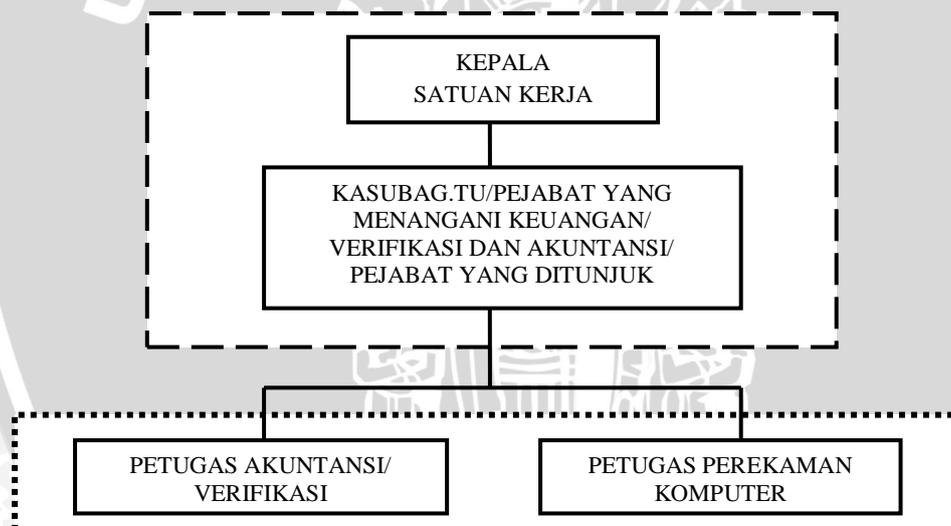
Namun, banyaknya frekuensi komunikasi sangat ditentukan oleh kesediaan kedua belah pihak untuk aktif bersinergi dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Seperti saat menghadapi permasalahan aplikasi, satuan kerja aktif berkonsultasi dengan operator di KPPN dan sebaliknya, pihak

KPPN bersedia memberikan layanan konsultasi kepada satuan kerja. Jika proses komunikasi ini berjalan lancar, akan berpengaruh pula pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan kedua belah pihak.

2.2.2.4 Organisasi Tim

Dalam lampiran Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-65/PB/2010, dijelaskan struktur organisasi unit akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga, termasuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), yakni pada tingkat satuan kerja, yang digambarkan dalam bagan berikut ini :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran



Keterangan :

----- : penanggung jawab

..... : petugas akuntansi keuangan

Dari gambar 2.1, dapat diketahui bahwa tim yang secara teknis menjalankan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada satuan kerja, dapat dibentuk dengan melibatkan beberapa staf yang bertugas secara khusus sebagai petugas akuntansi atau petugas verifikasi data/hasil dan operator komputer.

Dalam tim tersebut sangat dibutuhkan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) sebagai satu kesatuan laporan keuangan yang akan dihasilkan. SAKPA akan menghasilkan laporan keuangan, sedangkan SABMN menghasilkan laporan barang. Keterkaitannya terletak pada neraca laporan keuangan, dimana nilai rupiah yang tercantum merupakan hasil olahan dari SABMN. Dengan kata lain, laporan barang merupakan dokumen pendukung dari neraca laporan keuangan satuan kerja. Tidak berfungsinya pengorganisasian tim dalam pelaksanaan kerja dapat menimbulkan penurunan kinerja yang berdampak pada penurunan kualitas informasi yang dihasilkan. Penyampaian laporan akan terlambat, informasi kemungkinan tidak lengkap sehingga tidak mempunyai manfaat umpan balik dan manfaat prediktif.

2.2.2.5 Sarana Pendukung

Penyediaan sarana pendukung yang baik berguna dalam upaya mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas kerja. Sarana pendukung yang digunakan adalah sarana yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi yang dewasa ini telah sedemikian canggih. Menurut Mulyadi (2001) dalam Mahardika (2011), produktivitas karyawan sangat ditentukan oleh teknologi yang disediakan bagi karyawan untuk melaksanakan tugasnya. Ketertinggalan teknologi akan mengakibatkan penurunan produktivitas personil, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kapabilitas karyawan dalam menyediakan *value* terbaik. Sarana pendukung terkait teknologi yang dimaksud

mengarah pada tersedianya perangkat keras (komputer, printer, dan lain-lain) dan perangkat lunak (*software/aplikasi*).

Penggunaan komputer memiliki beberapa manfaat, di antaranya (Cortada, 1996 dalam Mahardika, 2011) :

1. Komputer memperpendek jalur komunikasi
2. Aplikasi-aplikasi berbasis komputer dapat dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang benar tersedia pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat
3. Komputer dapat mengumpulkan data transaksi dan juga data mengenai bagaimana proses-proses dikerjakan
4. Komputer membantu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan
5. Komputer memungkinkan pemberian jasa-jasa baru atau tambahan
6. Komputer memberikan pandangan yang lebih luas tentang pelanggan/klien
7. Komputer meningkatkan efisiensi pelayanan dan operasi.

Dari beberapa manfaat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan bantuan komputer, akan diperoleh nilai informasi yang tinggi, yaitu informasi dapat disajikan dalam waktu yang cepat dan tepat. Untuk pemrosesan data secara manual, biasanya berlaku bahwa semakin cepat waktu yang diinginkan untuk pemrosesan, maka biaya yang dibutuhkan akan semakin besar. Dengan bantuan komputer, pengolahan data dapat diatur sedemikian rupa sehingga informasi dapat disajikan tepat waktu dan dengan biaya yang sesuai dengan manfaat yang diperoleh.

Sarana pendukung yang kedua adalah perangkat lunak (*software*). Penyusunan laporan keuangan satuan kerja dibantu suatu *software/aplikasi* khusus

yang disebut Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang di dalamnya terdiri dari Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Dengan adanya aplikasi ini, maka personil yang bertugas menyusun laporan keuangan akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pelaporan atas pengelolaan keuangan negara.

Alasan digunakannya aplikasi ini adalah memudahkan tugas para pegawai pemerintah yang berkaitan langsung dengan proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah. Namun, akurasi pemrosesan komputer sangat bergantung pada kualitas data input. Kesalahan input dapat dikurangi tetapi tidak dapat dihilangkan seluruhnya dengan menyatukan pencegahan, pendeteksian, dan perbaikan kesalahan ke dalam rancangan sistem (McLeod, 1996 dalam Mahardika, 2011).

2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis dikembangkan dari telaah literatur yang bersumber pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk memperoleh perspektif ilmiah sebagai landasannya (Indriantoro dan Soepomo, 1999:73). Berikut hipotesis penelitian yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai.

2.3.1 Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki suatu organisasi menentukan tercapainya visi dan tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang

berlatar belakang pendidikan yang sesuai serta berpengalaman dalam bidang keuangan akan mampu menyelesaikan tugas-tugas terkait penyusunan laporan keuangan dengan kualitas yang baik.

Penelitian Choirunisah (2009) memberikan bukti bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh satuan kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap peraturan, sanksi keterlambatan penyampaian laporan, fungsi/cara kerja aplikasi, dan kemampuan penanganan kesalahan dalam aplikasi sangat diperlukan agar laporan keuangan yang berkualitas dapat diwujudkan. Selain itu, meskipun penyusunan laporan keuangan telah dipermudah dengan bantuan aplikasi, kesalahan masih mungkin terjadi jika proses input data yang dilakukan tidak benar, sehingga kemampuan sumber daya manusia tetap berperan besar dalam hal ini. Berdasarkan konsep dan bukti empiris yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, hipotesis 1 yang diajukan adalah :

H₁ : Kemampuan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

2.3.2 Aturan Hukum dan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Aturan hukum yang jelas, mudah dipahami dan diikuti, serta sosialisasi yang optimal akan mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas, dalam hal ini laporan keuangan yang akurat dan disusun secara tepat waktu. Penelitian Mahardika (2011) menunjukkan bahwa peraturan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Artinya, semakin baik

atau semakin mudah dipahaminya suatu peraturan, maka semakin tinggi ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan.

Aturan hukum yang tidak sering berubah-ubah juga menentukan keberhasilan penerapan aturan tersebut. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Hartina (2009) yang menyatakan bahwa peraturan yang sering berubah mengakibatkan pegawai sulit menerapkannya karena tidak begitu memahami, sehingga laporan keuangan menjadi terlambat disusun. Berdasarkan konsep dan bukti-bukti empiris yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, hipotesis 2 yang diajukan adalah :

**H₂ : Aturan hukum berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
Kementerian Negara/Lembaga**

2.3.3 Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja dan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Komunikasi memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitasnya. Hal ini konsisten dengan pendapat Warisno (2009) yang menyatakan bahwa dengan komunikasi yang baik, seluruh komponen dalam organisasi akan dapat bekerja secara sistematis untuk meningkatkan produktivitas khususnya dalam hal pengelolaan keuangan.

Terdapat dua tipe komunikasi yang dilakukan dalam suatu organisasi, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Variabel komunikasi yang dibahas dalam penelitian Warisno (2009), merupakan tipe komunikasi internal yakni komunikasi atasan dan bawahan untuk meningkatkan kinerja SKPD dalam pengelolaan

keuangan secara keseluruhan. Sedangkan dalam penelitian ini, tipe komunikasinya adalah komunikasi eksternal satuan kerja, yakni dengan KPPN. Hal ini karena pembahasan terpusat pada kualitas laporan keuangan yang disusun satuan kerja, yang nantinya akan dikonsolidasikan menjadi LKPP oleh KPPN, sehingga komunikasi yang baik antara KPPN dengan satuan kerja akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Komunikasi yang lancar antara KPPN dengan satuan kerja akan mempercepat penyampaian informasi penting terkait penyusunan laporan keuangan sehingga satuan kerja segera dapat merespon dan menjalankan ketentuan yang ada. Berdasarkan konsep ini, hipotesis 3 yang diajukan adalah :

H₃ : Komunikasi antara KPPN dengan satuan kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

2.3.4 Organisasi Tim dan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Organisasi tim yang terarah akan memudahkan pegawai dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya. Demikian halnya dalam penyusunan laporan keuangan. Pembentukan tim khusus yang bertugas menyusun laporan keuangan, akan memperjelas tanggung jawab dan memperlancar proses penyusunannya sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini dibuktikan oleh Choirunisah (2009) yang menemukan bahwa pembentukan tim khusus pelaksana Sistem Akuntansi Instansi, pembagian tugas di antara tim, dan kejelasan uraian tugas anggota tim sangat diperlukan agar relevansi informasi

laporan keuangan dapat diwujudkan. Berdasarkan konsep dan bukti empiris yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, hipotesis 4 yang diajukan adalah :

**H₄ : Organisasi tim berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
Kementerian Negara/Lembaga**

2.3.5 Sarana Pendukung dan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Sarana pendukung yang dapat diandalkan, seperti ketersediaan komputer yang dilengkapi aplikasi versi terbaru dan jaringan intranet maupun internet, akan mendukung terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya jaringan internet, arus komunikasi dengan KPPN akan lebih lancar dan memudahkan dalam mengakses peraturan baru maupun informasi penting lainnya terkait penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

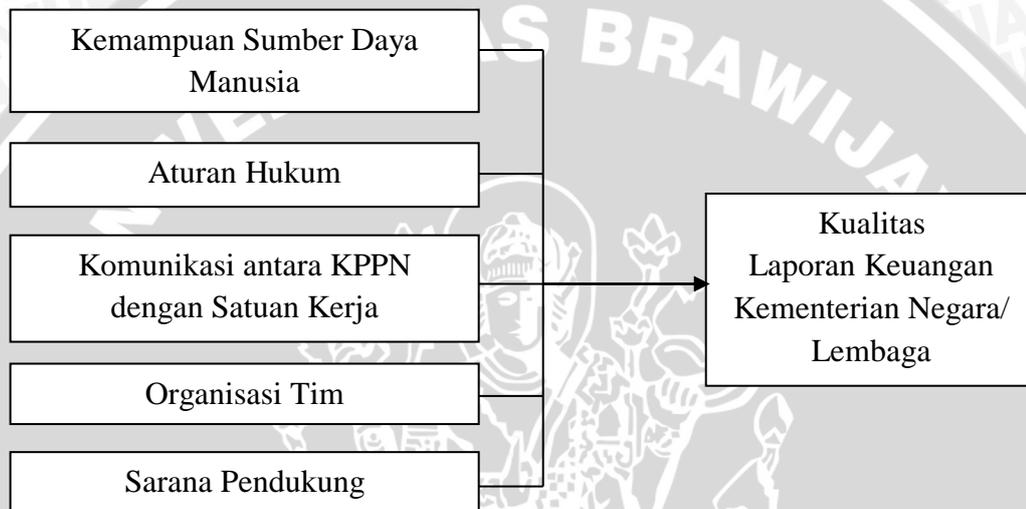
Nugraheni dan Subaweh (2008) dalam penelitiannya pada Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, menemukan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Mahardika (2011) juga menemukan bukti bahwa sarana pendukung mempunyai peranan penting dalam meningkatkan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan konsep dan bukti empiris yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, hipotesis 5 yang diajukan adalah :

**H₅ : Sarana pendukung berpengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan Kementerian Negara/Lembaga**

2.4 Kerangka Berpikir

Berdasarkan konsep-konsep yang telah diungkapkan, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran untuk memudahkan memahami hipotesis yang telah diajukan dalam model berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Pemikiran



Keterangan :

Garis — : menunjukkan pengaruh kemampuan sumber daya manusia, aturan hukum, komunikasi antara KPPN dengan satuan kerja, organisasi tim, dan sarana pendukung secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh bukti empiris sekaligus menguji pengaruh kemampuan sumber daya manusia, aturan hukum, komunikasi antara KPPN dengan satuan kerja, organisasi tim, dan sarana pendukung terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga tingkat satuan kerja. Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian kuantitatif. Indriantoro dan Supomo (2009:12) menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2009:115). Menurut Sugiyono (2004:90) populasi adalah wilayah generalisasi tertentu yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah operator Aplikasi SAKPA/staf penyusun laporan keuangan pada satuan kerja yang berada di wilayah kerja KPPN Surabaya II. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 183 orang operator Aplikasi SAKPA/staf penyusun laporan keuangan. Jumlah populasi ini disamakan

dengan jumlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola satuan kerja di wilayah kerja KPPN Surabaya II.

$n = \frac{N}{N(d)^2+1}$ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2004:91). Dalam pengambilan sampel bila subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika populasinya lebih dari 100 maka dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih (Arikunto, 2002:107). Bungin (2006:105) menyebutkan rumusan perhitungan sampel sebagai berikut :

Keterangan :

n : jumlah sampel yang dicari

N : jumlah populasi

d : nilai presisi (dalam penelitian ini ditentukan 90% atau $d = 0,1$)

Dengan menggunakan rumus di atas maka sampel dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{183}{183(0,1)^2 + 1} = 64,66$$

Dari perhitungan di atas, maka ditentukan jumlah sampel minimal dalam penelitian ini adalah sebesar 65 (dibulatkan).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam jenis penelitian ini termasuk dalam jenis data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Data

primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2009:146-147). Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai pemahaman dan pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang diajukan oleh peneliti.

Sedangkan data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Sekaran, 2007:60). Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah informasi mengenai ketepatan waktu dan frekuensi diterimanya ADK laporan keuangan satuan kerja sebagai indikator banyaknya revisi laporan keuangan sampai hasil rekonsiliasi dinyatakan sama. Data-data tersebut memungkinkan untuk diperoleh melalui Aplikasi Vera KPPN, yang merekam aktivitas rekonsiliasi data laporan keuangan dengan setiap satuan kerja.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei adalah metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis (Indriantoro dan Supomo, 2009:152). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner ditujukan kepada staf penyusun laporan keuangan pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Surabaya II. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh dengan melakukan survei literatur dari dokumen resmi KPPN Surabaya II terkait pelaksanaan rekonsiliasi.

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel menurut Indriantoro dan Supomo (2009:61) adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai untuk unit observasi atau individu yang

berbeda. Variabel memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena yang digeneralisasi dalam konstruk. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 1 (satu) variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (KUAL) dan 5 (lima) variabel bebas yaitu kemampuan sumber daya manusia (SDM), aturan hukum (ATR), komunikasi antara KPPN dengan satuan kerja (KMN), organisasi tim (ORG), dan sarana pendukung (SRN).

3.5.1 Variabel Terikat / *Dependent Variable*

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang diproksikan dengan ketepatan waktu dan frekuensi penerimaan ADK laporan keuangan.

Suatu laporan keuangan dikatakan tepat waktu apabila disampaikan kepada KPPN dan diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasinya pada periode 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya setelah periode pelaporan. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) adalah suatu dokumen yang diterbitkan oleh KPPN, yang menandakan telah selesainya proses rekonsiliasi data laporan keuangan antara satuan kerja dengan KPPN.

Berita Acara Rekonsiliasi akan diterbitkan oleh KPPN setelah syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu hasil rekonsiliasi data dinyatakan sama dan seluruh dokumen laporan keuangan telah diserahkan secara lengkap. Tanggal penerbitan BAR merupakan tolok ukur ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Artinya, tepat waktu atau tidaknya penyampaian laporan keuangan setiap satuan kerja, dilihat dari tanggal penerbitan BAR-nya.

Pemberian skor ketepatan waktu dalam penelitian ini mengacu pada Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang penilaian kualitas LKPP Kuasa BUN-KPPN, yakni setiap 1 hari keterlambatan dari batas waktu (selambat-lambatnya 7 hari kerja pada bulan berikutnya setelah periode pelaporan), skor akan dikurangi 5 (lima). Sedangkan jika masih dalam batas waktu tersebut akan diberi skor penuh, yakni 100.

Selain berdasarkan ketepatan waktu, kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini juga diukur berdasarkan frekuensi diterimanya ADK laporan keuangan satuan kerja oleh Aplikasi Vera KPPN. Frekuensi penerimaan ADK ini menunjukkan jumlah revisi laporan keuangan sampai hasil rekonsiliasi data dinyatakan sama. Aplikasi Vera KPPN merupakan aplikasi yang digunakan dalam proses rekonsiliasi data untuk memproses ADK hasil Aplikasi SAKPA sehingga dapat dibandingkan dengan data menurut KPPN. Frekuensi penerimaan ADK ini diukur dengan skor maksimal 100. Selengkapnya terdapat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Skor Frekuensi Penerimaan ADK

Frekuensi Terima ADK	Skor yang Diberikan
1	100
2	80
3	60
4	40
≥ 5	20

3.5.2 Variabel Bebas / *Independent Variable*

Variabel bebas merupakan variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan satuan kerja. Variabel ini antara lain :

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber daya yang dimiliki organisasi yaitu pegawai yang melaksanakan tugas penyusunan laporan keuangan. Instrumen dalam variabel ini adalah lima buah pertanyaan yang sebelumnya telah digunakan dalam penelitian Choirunisah (2009) dan Mahardika (2011).

Kemampuan sumber daya manusia diukur dengan kesesuaian latar belakang pendidikan operator, pemahaman operator atas uraian pekerjaannya, pemahaman atas pelatihan dan sosialisasi yang pernah diikuti, pemahaman atas aplikasi penyusunan laporan keuangan serta cara menangani masalah terkait aplikasi. Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), skor 4 (S=Setuju), skor 3 (N=Netral), skor 2 (TS=Tidak Setuju), dan skor 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

2. Aturan Hukum (ATR)

Aturan hukum yang dimaksud terkait dengan peraturan yang mengatur pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang harus dipatuhi oleh setiap pegawai dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan agar lebih terarah dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Instrumen dalam variabel penelitian ini adalah lima buah pertanyaan yang sebelumnya telah digunakan dalam penelitian Mahardika (2011) dengan beberapa pengembangan yang disesuaikan dengan karakteristik objek penelitian.

Variabel ini diukur dengan kualitas peraturan, kemudahan pemahaman, kepatuhan terhadap peraturan, dan sanksi pelanggaran. Variabel ini diukur dengan skala likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), skor 4 (S=Setuju), skor 3 (N=Netral), skor 2 (TS=Tidak Setuju), dan skor 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

3. Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja (KMN)

Komunikasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah komunikasi antara KPPN dengan satuan kerja di wilayah kerjanya dalam rangka penyusunan laporan keuangan, termasuk penyampaian informasi penting melalui kegiatan sosialisasi. Instrumen dalam variabel penelitian ini merupakan instrumen yang belum pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya, yang terdiri dari lima buah pertanyaan yang diajukan peneliti kepada responden.

Variabel ini diukur dengan kemudahan mendapatkan informasi terbaru dari KPPN, kualitas layanan konsultasi, efektivitas saluran komunikasi yang tersedia, kualitas informasi yang diberikan dan ketepatan waktu penyampaian informasi. Variabel ini diukur dengan skala interval 1 s.d. 5 untuk menunjukkan kecenderungan pendapat responden pada salah satu dari dua kutub jawaban yang dipisahkan lima angka tersebut.

4. Organisasi tim (ORG)

Organisasi tim dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pimpinan satuan kerja mengorganisasi tim operator SAI sehingga setiap pegawai

mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam penyusunan laporan keuangan. Instrumen dalam variabel penelitian ini adalah lima buah pertanyaan yang sebelumnya telah digunakan dalam penelitian Choirunisah (2009) dengan beberapa pengembangan yang disesuaikan dengan karakteristik objek penelitian.

Variabel ini diukur dengan formalisasi pembentukan tim, kejelasan tugas bagi masing-masing personil tim, efektivitas pembagian tugas dalam tim, dan koordinasi atasan dalam penyelesaian masalah. Variabel ini diukur dengan skala interval 1 s.d. 5 untuk menunjukkan kecenderungan pendapat responden pada salah satu dari dua kutub jawaban yang dipisahkan lima angka tersebut.

5. Sarana pendukung (SRN)

Sarana pendukung adalah sarana yang tersedia untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan di kantor, terutama yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Instrumen dalam variabel penelitian ini adalah lima buah pertanyaan yang sebelumnya telah digunakan dalam penelitian Mahardika (2011) dengan beberapa pengembangan yang disesuaikan dengan karakteristik objek penelitian.

Variabel ini diukur dengan ketersediaan perangkat komputer yang memadai, kualitas program aplikasi, peran sarana pendukung dalam meningkatkan kualitas pekerjaan, dan pelaksanaan *update* berkala terhadap program komputer. Variabel ini diukur dengan skala interval 1 s.d. 5 untuk

menunjukkan kecenderungan pendapat responden pada salah satu dari dua kutub jawaban yang dipisahkan lima angka tersebut.

3.6 Uji Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner untuk variabel bebasnya. Jogiyanto (2008:23) menyatakan bahwa jika kuesionernya sudah ada dan sudah digunakan di penelitian-penelitian lain, peneliti tidak perlu membangun kuesionernya sendiri. Namun jika belum ada kuesioner sebelumnya, maka peneliti tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus membuat kuesioner sendiri.

Tahapan-tahapan dalam membangun kuesioner adalah sebagai berikut (Jogiyanto, 2008:26) :

1. Melakukan pembentukan item-item

Pembentukan awal dimaksudkan untuk mendapatkan nama-nama konstruk dan item-item pertanyaan awal yang membentuk konstruk-konstruk yang diinginkan. Pembentukan item-item awal ini dapat mengacu pada hasil penelitian sebelumnya dan harus sesuai dengan teori yang relevan.

2. Melakukan tes awal (*pretest*)

Tes awal (*pretest*) adalah tes atau uji untuk meyakinkan bahwa item-item pertanyaan awal dapat dimengerti oleh calon partisipan atau responden survei.

Tujuan utama dari *pretest* adalah untuk menguji validitas isi (*content validity*).

Validitas isi menunjukkan tingkat seberapa besar item-item di instrumen mewakili konsep yang diukur.

3. Melakukan uji instrumen

Instrumen yang sudah dikembangkan di tahap sebelumnya perlu diuji validitas dan realibilitasnya. Uji instrumen ini terdiri dari dua tahap, yakni :

a. Uji pilot

Melakukan uji pilot dari keseluruhan instrumen. Uji pilot dapat dilakukan sekali atau dua kali. Uji pilot pertama merupakan uji pilot awal dan uji pilot kedua merupakan uji pilot skala penuh.

b. Uji lapangan akhir

Uji lapangan merupakan pengujian yang menggunakan data lapangan yang benar-benar digunakan di penelitian.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari kuesioner yang sudah ada pada penelitian sebelumnya sehingga peneliti tidak membangun kuesioner dari awal. Namun demikian, menurut Jogiyanto (2008:33) kuesioner yang sudah ada ini tetap memerlukan pengujian lebih lanjut karena akan digunakan di situasi (waktu dan tempat), serta responden yang berbeda.

Oleh karena itu, peneliti melakukan uji instrumen berupa uji pilot dan uji lapangan akhir terhadap kuesioner penelitian. Uji pilot yang dilakukan adalah uji pilot skala penuh, yaitu pengujian menggunakan responden yang latar belakangnya sama dengan populasi target dari penelitian, yaitu para staf penyusun laporan keuangan pada satuan kerja yang berada di wilayah kerja KPPN Amlapura, Bali. Sedangkan uji lapangan akhir akan menggunakan responden sebenarnya, yakni para staf penyusun laporan keuangan pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Surabaya II.

3.7 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan pada tahap awal untuk mengetahui apakah data yang terkumpul merupakan data yang valid dan reliabel. Setelah proses ini selesai, akan dapat diketahui data mana yang dapat digunakan pada pengujian tahap berikutnya. Pengujian instrumen dan analisis data dalam penelitian ini akan digunakan program *SPSS (Statistical Program for Social Science) for Windows*.

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner yang mana kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006:49). Uji validitas dalam penelitian ini dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Untuk menghitung korelasi digunakan analisis *pearson correlations* dimana alat ukur dianggap valid apabila memiliki koefisien korelasi signifikan ($p\text{ value} < 0,05$).

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006:45). Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *alpha* dari *Cronbach*. Pengujian dapat dilakukan setelah semua butir pertanyaan valid. Pengujian reliabilitas dengan metode *Cronbach's Alpha* memiliki kriteria pengujian, yaitu jika koefisien alpha (α) $\geq 0,6$, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen yang digunakan reliabel.

3.8 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan untuk uji hipotesisnya menggunakan analisis regresi linier berganda.

3.8.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memperoleh hasil yang tidak bias.

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik meliputi :

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2006:147), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* terhadap nilai residual hasil persamaan regresi. Bila probabilitas hasil uji *Kolmogorov Smirnov* lebih besar dari 0,05 (5%) maka asumsi normalitas terpenuhi.

2. Uji Multikolinieritas

Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian asumsi multikolinieritas ini dilakukan dengan mendeteksi nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Jika nilai $VIF \leq 10$ dan nilai *Tolerance* $> 0,1$ maka dapat dikatakan bahwa pada model regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Untuk mendeteksinya, dapat menggunakan uji *Glejser* yaitu dengan meregresi variabel independen terhadap nilai *absolute residual* hasil persamaan regresi. Jika variabel independen secara signifikan (nilai signifikansi $< 0,05$) mempengaruhi variabel *absolute residual*, maka terjadi heteroskedastisitas.

3.8.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan untuk menentukan pola hubungan antara lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan dari regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{KUAL} = a + b_1\text{SDM} + b_2\text{ATR} + b_3\text{KMN} + b_4\text{ORG} + b_5\text{SRN} + e$$

Keterangan :

KUAL = kualitas laporan keuangan satuan kerja

a = konstanta (*intercept*)

SDM = Kemampuan sumber daya manusia

ATR = Aturan hukum

KMN = Komunikasi antara KPPN dengan satuan kerja

ORG	=	Organisasi tim
SRN	=	Sarana pendukung
b_1, \dots, b_5	=	koefisien regresi
e	=	kesalahan pengganggu (<i>standard error</i>)

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen secara individual atau parsial terhadap variabel dependen maka dilakukan uji signifikan parameter individual (uji statistik t). Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen didukung. Signifikansi pengaruh variabel independen secara parsial juga dapat dilakukan dengan melihat probabilitas signifikansi t-nya. Jika nilai signifikansinya $< 0,05$ maka variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah satuan kerja-satuan kerja di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II. Total satuan kerja pada tahun penelitian ini dilaksanakan (tahun anggaran 2011) berjumlah 125 satuan kerja yang tersebar di tiga wilayah, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Bangkalan, yang mengelola 183 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Daftar satuan kerja ini terdapat pada Lampiran 1, yang secara umum terdiri dari :

- 1) 11 satuan kerja pusat/kantor pusat (KP) di bawah 3 Kementerian Negara/Lembaga, antara lain :
 - a. 5 satuan kerja di bawah Kementerian Pertahanan (5 DIPA)
 - b. 1 satuan kerja di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (1 DIPA)
 - c. 5 satuan kerja di bawah Kementerian Perhubungan (5 DIPA)
- 2) 81 satuan kerja vertikal/kantor daerah (KD) yang merupakan instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga di daerah yang berada di bawah 12 Kementerian Negara/Lembaga, antara lain :
 - a. 10 satuan kerja di bawah Mahkamah Agung (20 DIPA)
 - b. 5 satuan kerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM (5 DIPA)

- c. 3 satuan kerja di bawah Kementerian Pertanian (3 DIPA)
 - d. 2 satuan kerja di bawah Kementerian Perindustrian (2 DIPA)
 - e. 7 satuan kerja di bawah Kementerian Perhubungan (7 DIPA)
 - f. 6 satuan kerja di bawah Kementerian Kesehatan (6 DIPA)
 - g. 16 satuan kerja di bawah Kementerian Agama (26 DIPA)
 - h. 2 satuan kerja di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (2 DIPA)
 - i. 1 satuan kerja di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi (1 DIPA)
 - j. 25 satuan kerja di bawah Kepolisian Republik Indonesia (25 DIPA)
 - k. 1 satuan kerja di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan (1 DIPA)
 - l. 3 satuan kerja di bawah Badan Meteorologi dan Geofisika (3 DIPA)
- 3) 16 satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang dilimpahi wewenang oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melaksanakan/mengelola dana Dekonsentrasi (DK), antara lain :
- a. 4 satuan kerja yang dilimpahi wewenang menjalankan urusan Kementerian Dalam Negeri (4 DIPA)
 - b. 6 satuan kerja yang dilimpahi wewenang menjalankan urusan Kementerian Pertanian (16 DIPA)
 - c. 1 satuan kerja yang dilimpahi wewenang menjalankan urusan Kementerian Perindustrian (2 DIPA)
 - d. 1 satuan kerja yang dilimpahi wewenang menjalankan urusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (1 DIPA)
 - e. 1 satuan kerja yang dilimpahi wewenang menjalankan urusan Kementerian Kesehatan (6 DIPA)

- f. 1 satuan kerja yang dilimpahi wewenang menjalankan urusan Kementerian Sosial (4 DIPA)
 - g. 1 satuan kerja yang dilimpahi wewenang menjalankan urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (6 DIPA)
 - h. 1 satuan kerja yang dilimpahi wewenang menjalankan urusan Kementerian Perdagangan (5 DIPA)
- 4) 14 satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melaksanakan Tugas Pembantuan (TP), antara lain :
- a. 1 satuan kerja yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri (1 DIPA)
 - b. 5 satuan kerja yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian (10 DIPA)
 - c. 4 satuan kerja yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan (4 DIPA)
 - d. 1 satuan kerja yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial (2 DIPA)
 - e. 3 satuan kerja yang ditunjuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (7 DIPA)
- 5) 1 satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan Urusan Bersama (UB).
- 6) 2 satuan kerja (KP) yang melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang bersumber dari Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain.

4.2 Gambaran Umum Responden

Responden pada penelitian ini adalah para operator SAKPA atau staf penyusun laporan keuangan pada satuan kerja-satuan kerja di wilayah kerja KPPN

Surabaya II. Kuesioner disebarikan pada tanggal 2-9 Desember 2011 pada masa rekonsiliasi SAI-SAU di KPPN Surabaya II. Pemilihan waktu rekonsiliasi, yakni selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya setelah periode pelaporan (PMK No. 71/PMK.05/2007) dilakukan untuk memudahkan penyebaran dan pengumpulan kuesioner bagi peneliti, karena target responden yang tersebar di tiga wilayah kabupaten/kota akan berada pada satu tempat (KPPN) dalam satu periode tersebut. Gambaran umum responden dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Gambaran Umum Responden

	Uraian	N	%
Jenis Kelamin	Laki-laki	51	68%
	Perempuan	24	32%
	Total	75	100%
Pendidikan Terakhir	SMU/SMK	16	21%
	Diploma (D1/D2/D3) Akuntansi	1	1%
	Diploma (D1/D2/D3) Non Akuntansi	3	4%
	S1 Akuntansi	5	7%
	S1 Ekonomi Non Akuntansi	18	24%
	S1 Lainnya	31	42%
	S2	1	1%
Total	75	100%	
Lama menduduki posisi	≤ 1 tahun	12	16%
	> 1 - 3 tahun	36	48%
	> 3 tahun	27	36%
	Total	75	100%
Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang pernah diikuti terkait penyusunan laporan keuangan	Belum pernah	5	7%
	1 kali	14	19%
	2 kali	23	31%
	3 kali	6	8%
	> 3 kali	27	36%
	Total	75	100%

Sumber : Data primer (diolah)

Dari 100 kuesioner yang disebar, 78 kuesioner (78%) dikembalikan kepada peneliti. Dari jumlah yang diterima tersebut, sebanyak 75 kuesioner (96%) digunakan dalam uji statistik penelitian ini, sedangkan sisanya sebanyak 3 kuesioner (4%) tidak dapat digunakan karena tidak diisi lengkap (2 kuesioner) atau tidak mencantumkan nama satuan kerja sehingga tidak dapat dibandingkan dengan data sekunder variabel kualitas laporan keuangan (1 kuesioner).

4.3 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dari data kuesioner merupakan gambaran respons responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Hal ini akan menunjukkan kecenderungan pilihan jawaban responden berdasarkan frekuensi skor yang dipilih. Sedangkan untuk data sekunder, statistik deskriptif berguna untuk mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai rata-rata dari data yang diuji.

4.3.1 Variabel Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Variabel kemampuan sumber daya manusia ini diprosikan dengan lima buah pernyataan. Responden diminta untuk menyatakan sikap setuju atau tidak setuju yang ditunjukkan dalam skor 1 s.d. 5. Respons terhadap lima pernyataan untuk variabel kemampuan sumber daya manusia disajikan dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2
Hasil Kuesioner Variabel Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pertanyaan	Uraian	Rata-Rata	Std. Dev	Nilai Skor									
				1		2		3		4		5	
				Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Kesesuaian pekerjaan dengan latar belakang pendidikan	3,65	1,020	1	1%	10	13%	20	27%	27	36%	17	23%
2	Pemahaman uraian pekerjaan	3,92	0,882	1	1%	7	10%	5	7%	46	61%	16	21%
3	Pemahaman materi pelatihan dan sosialisasi	3,53	0,759	-	-	9	12%	20	27%	43	57%	3	4%
4	Pemahaman fungsi dan cara kerja aplikasi	3,88	0,592	-	-	2	3%	12	16%	54	72%	7	9%
5	Pemahaman tentang penanganan masalah dalam aplikasi	3,23	0,831	1	1%	14	18%	29	39%	29	39%	2	3%

Sumber : Data primer (diolah)

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa rata-rata jawaban responden berada di antara angka 3 dan 4, yang berarti rata-rata responden menyatakan sikap netral atau sikap setuju terhadap lima pernyataan yang diajukan peneliti. Respons yang diberikan umumnya terpusat pada skor 4, namun pada pertanyaan kelima seimbang pada skor 3 dan 4. Selebihnya jawaban bervariasi pada skor 1, 2 dan 5.

Nilai rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 3,92 ada pada pernyataan kedua yang menunjukkan bahwa responden secara umum memahami uraian pekerjaan mereka (*job description*), meskipun hasil statistik deskriptif menunjukkan sebagian besar responden (68%) berlatar belakang pendidikan non ekonomi. Sedangkan pada pernyataan keempat, yakni pernyataan mengenai pemahaman fungsi dan cara kerja aplikasi, sebanyak 72% responden menjawab setuju (skor 4). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mampu

mengoperasikan aplikasi dengan baik, selama tidak ada masalah dalam aplikasi yang dijalankan.

4.3.2 Variabel Aturan Hukum (ATR)

Respons terhadap lima pernyataan terkait variabel Aturan Hukum disajikan dalam tabel 4.3. Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata jawaban responden berada di antara angka 3 dan 4, yang berarti rata-rata responden menyatakan sikap netral dan sikap setuju terhadap pernyataan yang diajukan. Respons yang diberikan umumnya terpusat pada skor 4, kemudian diikuti skor 3 dengan persentase yang cukup besar.

Tabel 4.3
Hasil Kuesioner Variabel Aturan Hukum

Pertanyaan	Uraian	Rata-Rata	Std. Dev	Nilai Skor									
				1		2		3		4		5	
				Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Peran peraturan dalam mengarahkan pegawai	3,93	0,664	-	-	1	1%	16	22%	45	60%	13	17%
2	Kemudahan memahami peraturan	3,56	0,663	-	-	7	10%	19	25%	49	65%	-	-
3	Kepatuhan pada peraturan	3,57	0,619	-	-	2	3%	31	41%	39	52%	3	4%
4	Kesesuaian laporan keuangan dengan aturan	4,01	0,533	-	-	-	-	10	13%	54	72%	11	15%
5	Pemberlakuan sanksi keterlambatan penyampaian laporan keuangan	3,80	0,615	-	-	2	3%	18	24%	49	65%	6	8%

Sumber : Data primer (diolah)

Nilai rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 4,01 ada pada pernyataan keempat, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan aturan yang berlaku. Hal ini

menunjukkan bahwa format laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan. Peraturan terkait penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga memang dilengkapi format laporan keuangan yang detail pada setiap jenjang, termasuk untuk satuan kerja.

4.3.3 Variabel Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja (KMN)

Respons dari lima pertanyaan yang diajukan peneliti terkait variabel Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Hasil Kuesioner Variabel Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja

Pertanyaan	Uraian	Rata-Rata	Std. Dev	Nilai Skor									
				1		2		3		4		5	
				Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Kemudahan akses informasi penting dari KPPN	3,76	0,913	-	-	4	5%	31	41%	25	34%	15	20%
2	Kualitas layanan konsultasi pada KPPN	4,21	0,722	-	-	-	-	12	16%	39	52%	24	32%
3	Kecepatan penyampaian info penting dari KPPN	3,76	0,750	-	-	2	3%	24	32%	40	53%	9	12%
4	Efektivitas saluran komunikasi (<i>email, website</i>)	3,53	1,004	3	4%	5	9%	35	44%	18	24%	14	19%
5	Kemudahan memahami informasi yang diberikan KPPN	3,88	0,697	-	-	2	3%	17	22%	50	67%	6	8%

Sumber : Data primer (diolah)

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban responden berada di antara angka 3 dan 4, yang berarti rata-rata responden menyatakan skala tengah sebagai pilihan jawaban mereka. Secara umum, persentase tertinggi untuk setiap

pertanyaan bervariasi antara skor 3 dan 4. Setelah itu persentase tertinggi diduduki skor 5, yakni pada pertanyaan No. 2.

Nilai rata-rata tertinggi, yakni 4,21 ada pada pertanyaan mengenai kualitas layanan konsultasi yang diberikan KPPN. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden merasa puas dengan kualitas layanan yang diberikan KPPN. Sedangkan nilai rata-rata terendah ada pada pertanyaan mengenai efektivitas saluran komunikasi (*email/website*). Untuk pertanyaan ini, sebagian besar responden (44%) memilih skala 3 untuk mewakili pendapat mereka. Hal ini karena pada saat ini, *website* yang dikelola KPPN Surabaya II sedang dalam perbaikan, sehingga tidak optimal dalam penyebaran informasi kepada satuan kerja.

4.3.4 Variabel Organisasi Tim (ORG)

Respons terhadap lima pertanyaan dalam variabel organisasi tim disajikan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Kuesioner Variabel Organisasi Tim

Pertanyaan	Uraian	Rata-Rata	Std. Dev	Nilai Skor									
				1		2		3		4		5	
				Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Formalisasi penunjukan tim penyusun laporan keuangan	4,09	1,002	3	4%	3	4%	7	9%	33	44%	29	39%
2	Kejelasan uraian tugas di antara anggota tim	3,73	0,875	1	1%	5	7%	20	27%	36	48%	13	17%
3	Konsistensi dalam pelaksanaan tugas	3,81	0,800	-	-	3	4%	23	31%	34	45%	15	20%
4	Efektivitas pembagian tugas	3,76	0,852	1	1%	3	4%	23	31%	34	45%	14	19%
5	Koordinasi atasan dalam pemecahan masalah	3,87	0,905	1	1%	4	5%	18	24%	33	44%	19	26%

Sumber : Data primer (diolah)

Dari Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa rata-rata jawaban responden mendekati angka 4, yang berarti rata-rata responden memilih skala mendekati 4 untuk menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti. Secara umum, skor 4 juga merupakan persentase tertinggi dari kelima pertanyaan dalam variabel ini. Selanjutnya, sebagian responden memilih skala 3 dan 5.

Nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,09, ada pada pertanyaan pertama tentang formalisasi pembentukan tim penyusun laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden atau satuan kerja tempat mereka bekerja telah mendokumentasikan keputusan penunjukan staf penyusun laporan keuangan dalam surat resmi, misalnya surat keputusan kepala kantor.

4.3.5 Variabel Sarana Pendukung (SRN)

Respons terhadap lima pertanyaan terkait variabel Sarana Pendukung disajikan dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Kuesioner Variabel Sarana Pendukung

Pertanyaan	Uraian	Rata-Rata	Std. Dev	Nilai Skor									
				1		2		3		4		5	
				Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Kesesuaian jumlah fisik dengan kebutuhan	3,61	0,957	1	1%	11	15%	15	20%	37	49%	11	15%
2	Spesifikasi sarana dalam optimalisasi penyelesaian pekerjaan	3,55	0,920	3	4%	5	7%	23	31%	36	48%	8	10%
3	Kemudahan menjalankan aplikasi	3,91	0,681	-	-	1	1%	18	24%	43	57%	13	18%
4	Peran sarana dalam peningkatan kualitas pekerjaan	4,43	0,661	-	-	-	-	7	9%	29	39%	39	52%
5	Update software/aplikasi	4,07	0,794	-	-	2	3%	15	20%	34	45%	24	32%

Sumber : Data primer (diolah)

Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban responden berkisar pada angka 3 dan 4, yang berarti bahwa rata-rata responden memilih skala 3 dan 4 dalam setiap pertanyaan. Secara umum, persentase tertinggi jawaban responden berada di skor 4, namun pada pertanyaan No. 4 berpusat pada skor 5. Hanya beberapa responden yang memilih skala 1, yakni hanya pada pertanyaan No. 1 dan 2.

Nilai rata-rata tertinggi, yaitu 4,43 ada pada pertanyaan tentang peran sarana pendukung dalam penyelesaian pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden merasa terbantu dengan keberadaan sarana pendukung tersebut dalam penyelesaian tugas-tugas mereka.

4.3.6 Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Variabel kualitas laporan keuangan diukur berdasarkan ketepatan waktu dan frekuensi penerimaan ADK yang informasinya dapat diperoleh dari data Monitoring Penerimaan ADK dari SAKPA Bulanan yang merupakan keluaran Aplikasi Vera KPPN. Periode laporan keuangan yang diuji adalah triwulan III tahun anggaran 2011, yakni laporan keuangan periode bulan Juli, Agustus, dan September 2011. Sedangkan skor yang digunakan dalam uji regresi adalah skor rata-rata dari tiga bulan periode laporan keuangan tersebut. Gambaran statistik deskriptif atas kualitas laporan keuangan responden dalam penelitian ini terdapat dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Proksi Kualitas Laporan Keuangan	N	Skor Minimum	Skor Maksimum	Rata-Rata	Std. Dev.
Ketepatan Waktu	75	67	100	97,72	5,387
Frekuensi Penerimaan ADK	75	20	100	83,00	16,740

Sumber : Data sekunder (diolah)

Dari Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa untuk ketepatan waktu, skor terendah adalah 67, artinya masih ada satuan kerja yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Sedangkan skor tertinggi 100 menunjukkan bahwa ada satuan kerja telah tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan nilai rata-rata yaitu sebesar 97,72, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar satuan kerja telah tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangannya.

Untuk aspek frekuensi penerimaan ADK, skor terendah adalah 20 (frekuensi penerimaan ADK-nya ≥ 5), artinya masih ada satuan kerja yang melakukan revisi laporan keuangan sebanyak empat kali atau lebih, sebelum hasil rekonsiliasi dinyatakan sama. Sedangkan skor tertinggi adalah 100 (frekuensi penerimaan ADK-nya = 1), artinya ada satuan kerja yang ADK laporan keuangannya telah sesuai dengan catatan KPPN sejak pertama diterima sehingga tidak perlu melakukan revisi. Nilai rata-rata untuk aspek ini adalah 83, artinya tingkat revisi laporan keuangan pada satuan kerja cukup rendah.

4.4 Hasil Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian yang dimaksud di sini adalah pengujian pada tahap uji pilot yang bertujuan untuk menguji apakah seluruh pertanyaan dalam kuesioner telah layak dan memenuhi syarat (valid dan reliabel) untuk digunakan

dalam penelitian. Uji pilot dilakukan terhadap satuan kerja di wilayah kerja KPPN Amlapura, Bali. Dari 35 kuesioner yang disebar, 32 kuesioner dikembalikan kepada peneliti. Dari jumlah yang diterima tersebut, sebanyak 30 kuesioner digunakan dalam pengujian validitas dan reliabilitas, sedangkan sisanya (2 kuesioner) tidak dapat digunakan karena tidak diisi lengkap.

4.4.1 Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas terhadap 25 pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner disajikan dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas pada Uji Pilot

Variabel	Pertanyaan	Koefisien Korelasi terhadap variabel	Signifikansi	Keterangan
Kemampuan Sumber Daya Manusia	1	0,793	0,000	Valid
	2	0,754	0,000	Valid
	3	0,669	0,000	Valid
	4	0,665	0,000	Valid
	5	0,225	0,233	Tidak Valid
Aturan Hukum	1	0,677	0,000	Valid
	2	0,559	0,001	Valid
	3	0,807	0,000	Valid
	4	0,688	0,000	Valid
	5	0,770	0,000	Valid
Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja	1	0,682	0,000	Valid
	2	0,690	0,000	Valid
	3	0,738	0,000	Valid
	4	0,741	0,000	Valid
	5	0,780	0,000	Valid
Organisasi Tim	1	0,787	0,000	Valid
	2	0,886	0,000	Valid
	3	0,860	0,000	Valid
	4	0,900	0,000	Valid

	5	0,821	0,000	Valid
Sarana	1	0,888	0,000	Valid
Pendukung	2	0,885	0,000	Valid
	3	0,805	0,000	Valid
	4	0,478	0,008	Valid
	5	0,482	0,007	Valid

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.8, diketahui bahwa pertanyaan nomor 5 pada variabel kemampuan sumber daya manusia memiliki koefisien korelasi sebesar 0,225 dan signifikansi $> 0,05$ yaitu sebesar 0,233, sehingga dinyatakan tidak valid. Dalam tahapan penelitian selanjutnya di lapangan, pertanyaan ini tidak diikutsertakan kembali dan digantikan dengan pertanyaan lain yang disarikan dari penelitian terdahulu.

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas terhadap item-item pertanyaan dalam kuesioner yang disebarakan pada uji pilot ini disajikan dalam Tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas pada Uji Pilot

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kemampuan Sumber Daya Manusia	0,644	Reliabel
Aturan Hukum	0,724	Reliabel
Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja	0,773	Reliabel
Organisasi Tim	0,904	Reliabel
Sarana Pendukung	0,775	Reliabel

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang diujikan telah lulus uji reliabilitas dengan koefisien Cronbach's Alpha $> 0,6$ sehingga dapat digunakan dalam tahapan penelitian selanjutnya.

4.5 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan pada tahap awal untuk mengetahui apakah data yang terkumpul merupakan data yang valid dan reliabel. Setelah proses ini selesai, akan dapat diketahui data mana yang dapat digunakan pada pengujian tahap berikutnya.

4.5.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan yang diajukan benar-benar mengukur variabel yang diinginkan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *pearson product moment correlation* untuk melihat bagaimana hubungan antara masing-masing pertanyaan terhadap nilai total variabel yang diuji. Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ berarti ada korelasi yang signifikan antara pertanyaan yang diajukan dengan nilai variabel yang akan diujikan.

4.5.1.1 Uji Validitas Variabel Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Hasil uji validitas untuk lima pertanyaan yang terdapat dalam variabel SDM disajikan dalam Tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Variabel Kemampuan Sumber Daya Manusia

Pertanyaan	Koefisien Korelasi terhadap SDM	Signifikansi	Keterangan
SDM01	0,769	0,000	Valid
SDM02	0,829	0,000	Valid
SDM03	0,653	0,000	Valid
SDM04	0,796	0,000	Valid
SDM05	0,737	0,000	Valid

Sumber : Lampiran 4

Tabel 4.10 menunjukkan semua pertanyaan berkorelasi secara signifikan terhadap variabel SDM (p value $<0,05$) sehingga semua pertanyaan dianggap memenuhi syarat pengujian.

4.5.1.2 Uji Validitas Variabel Aturan Hukum (ATR)

Hasil uji validitas untuk lima pertanyaan yang terdapat dalam variabel ATR disajikan dalam Tabel 4.11 berikut.

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Variabel Aturan Hukum

Pertanyaan	Koefisien Korelasi terhadap ATR	Signifikansi	Keterangan
ATR01	0,709	0,000	Valid
ATR02	0,546	0,000	Valid
ATR03	0,672	0,000	Valid
ATR04	0,718	0,000	Valid
ATR05	0,633	0,000	Valid

Sumber : Lampiran 4

Tabel 4.11 menunjukkan semua pertanyaan berkorelasi secara signifikan terhadap variabel ATR (p value $<0,05$) sehingga semua pertanyaan dianggap memenuhi syarat pengujian.

4.5.1.3 Uji Validitas Variabel Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja (KMN)

Hasil uji validitas untuk lima pertanyaan yang terdapat dalam variabel KMN disajikan dalam tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Variabel Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja

Pertanyaan	Koefisien Korelasi terhadap KMN	Signifikansi	Keterangan
KMN01	0,720	0,000	Valid
KMN02	0,742	0,000	Valid
KMN03	0,682	0,000	Valid
KMN04	0,647	0,000	Valid
KMN05	0,773	0,000	Valid

Sumber : Lampiran 4

Tabel 4.12 menunjukkan semua pertanyaan berkorelasi secara signifikan terhadap variabel KMN (p value $<0,05$) sehingga semua pertanyaan dianggap memenuhi syarat pengujian.

4.5.1.4 Uji Validitas Variabel Organisasi Tim (ORG)

Hasil uji validitas untuk lima pertanyaan yang terdapat dalam variabel ORG disajikan dalam tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Variabel Organisasi Tim

Pertanyaan	Koefisien Korelasi terhadap ORG	Signifikansi	Keterangan
ORG01	0,772	0,000	Valid
ORG02	0,889	0,000	Valid
ORG03	0,841	0,000	Valid
ORG04	0,855	0,000	Valid
ORG05	0,843	0,000	Valid

Sumber : Lampiran 4

Tabel 4.13 menunjukkan semua pertanyaan berkorelasi secara signifikan terhadap variabel ORG (p value $<0,05$) sehingga semua pertanyaan dianggap memenuhi syarat pengujian.

4.5.1.5 Uji Validitas Variabel Sarana Pendukung (SRN)

Hasil uji validitas untuk lima pertanyaan yang terdapat dalam variabel SRN disajikan dalam tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas Variabel Sarana Pendukung

Pertanyaan	Koefisien Korelasi terhadap SRN	Signifikansi	Keterangan
SRN01	0,816	0,000	Valid
SRN02	0,814	0,000	Valid
SRN03	0,754	0,000	Valid
SRN04	0,724	0,000	Valid
SRN05	0,665	0,000	Valid

Sumber : Lampiran 4

Tabel 4.14 menunjukkan semua pertanyaan berkorelasi secara signifikan terhadap variabel SRN (p value $< 0,05$) sehingga semua pertanyaan dianggap memenuhi syarat pengujian.

4.5.2 Uji Reliabilitas

Setiap instrumen yang digunakan harus lulus uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas menggunakan koefisien *cronbach's alpha*. Jika koefisien *cronbach's alpha* $> 0,6$ maka instrumen tersebut dinyatakan lulus uji reliabilitas.

Tabel 4.15
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)	0,802	Reliabel
Aturan Hukum (ATR)	0,660	Reliabel
Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja (KMN)	0,740	Reliabel
Organisasi Tim (ORG)	0,895	Reliabel
Sarana Pendukung (SRN)	0,807	Reliabel

Sumber : Lampiran 4

Dari Tabel 4.15 dapat disimpulkan semua variabel yang diujikan dinyatakan lulus uji reliabilitas dengan koefisien *Cronbach Alpha* > 0,6.

4.6 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memperoleh hasil yang tidak bias. Dalam penelitian ini digunakan tiga pengujian, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

4.6.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2006:147), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* terhadap nilai residual hasil persamaan regresi. Bila probabilitas hasil uji *Kolmogorov Smirnov* lebih besar dari 0,05 (5%) maka asumsi normalitas terpenuhi, dan sebaliknya asumsi normalitas tidak terpenuhi. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	13.13044711
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.043
	Negative	-.057
Kolmogorov-Smirnov Z		.490
Asymp. Sig. (2-tailed)		.970

a. Test distribution is Normal.

Dari Tabel 4.16, hasil pengujian terhadap nilai residual menghasilkan nilai *Asymptotic Significance* $> 0,05$ yaitu sebesar 0,970. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas.

4.6.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2006:95), uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian asumsi multikolinieritas ini dilakukan dengan mendeteksi nilai VIF dan Tolerance. Jika nilai VIF ≤ 10 dan nilai Tolerance $> 0,1$ maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)	0,609	1,643	Nonmultikolinieritas
Aturan Hukum (ATR)	0,542	1,846	Nonmultikolinieritas
Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja (KMN)	0,481	2,079	Nonmultikolinieritas
Organisasi Tim (ORG)	0,635	1,575	Nonmultikolinieritas
Sarana Pendukung (SRN)	0,372	2,685	Nonmultikolinieritas

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan Tabel 4.17 diketahui bahwa seluruh variabel menghasilkan nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala multikolinieritas.

4.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2006:125), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji menggunakan uji *glejser* yaitu dengan meregresi semua variabel bebas terhadap nilai absolut residual hasil persamaan regresi. Bila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti nonheteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.18.

Tabel 4.18
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel bebas	Sig.	Keterangan
Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)	0,422	Homoskedastisitas
Aturan Hukum (ATR)	0,194	Homoskedastisitas
Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja (KMN)	0,658	Homoskedastisitas
Organisasi Tim (ORG)	0,780	Homoskedastisitas
Sarana Pendukung (SRN)	0,410	Homoskedastisitas

Sumber : Lampiran 5

Dari Tabel 4.18 diketahui bahwa nilai signifikansi kelima variabel bebas lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi homoskedastisitas.

4.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi linier berganda pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dengan menggunakan program SPSS 17. Hasil pengujian hipotesis pada model regresi dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Coefficient	t-test		R Square	F-test	
		t-stat	Sig.		F-stat	Sig.
(Constant)	84,480	5,496	0,000	0,443	10,967	0,000
SDM	1,850	2,825	0,006			
ATR	1,108	1,042	0,301			
KMN	0,583	0,740	0,462			
ORG	1,205	2,248	0,028			
SRN	0,369	0,434	0,666			

Sumber : Lampiran 6

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji apakah kemampuan sumber daya manusia (SDM), aturan hukum (ATR), komunikasi antara KPPN dengan satuan kerja (KMN), organisasi tim (ORG), dan sarana pendukung (SRN) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Uji hipotesis dilakukan dengan melakukan uji ANOVA kelima variabel independen terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan) secara serentak untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen tersebut terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan).

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4.19, diketahui nilai F-Statistik sebesar 10,967 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa data valid. Sedangkan nilai R Square untuk variabel dependen (KUAL) sebesar 0,443 atau 44,3%. Artinya, variabel KUAL dipengaruhi sebesar 44,3% oleh variabel kemampuan sumber daya manusia,

aturan hukum, komunikasi antara KPPN dengan satuan kerja, organisasi tim, dan sarana pendukung, sedangkan sisanya sebesar 55,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar lima variabel bebas yang diteliti.

Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial juga dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung (t -stat) dengan t tabel. Penentuan t tabel menggunakan tingkat signifikan 5% dengan $df=n-k-1$ (pada penelitian ini $df=75-6-1=68$), sehingga didapat nilai t tabel sebesar 1,995.

4.7.1 Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis I bertujuan untuk menguji apakah kemampuan sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (KUAL).

Rumusan hipotesis 1 adalah sebagai berikut :

H_1 : Kemampuan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Dari uji hipotesis (Tabel 4.19) dapat disimpulkan bahwa kemampuan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung variabel SDM lebih besar daripada t tabel ($2,825 > 1,995$) dan nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,006 sehingga hipotesis H_1 didukung.

4.7.2 Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis II bertujuan untuk menguji apakah aturan hukum (ATR) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (KUAL). Rumusan hipotesis 2 adalah sebagai berikut :

H_2 : Aturan hukum berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Dari uji hipotesis (Tabel 4.19) dapat disimpulkan bahwa aturan hukum tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung variabel ATR lebih kecil daripada t tabel ($1,042 < 1,995$) dan nilai signifikan t lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,301 sehingga hipotesis H_2 tidak didukung.

4.7.3 Pengujian Hipotesis 3

Pengujian hipotesis III bertujuan untuk menguji apakah komunikasi antara KPPN dengan satuan kerja (KMN) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (KUAL). Rumusan hipotesis III adalah sebagai berikut :

H_3 : Komunikasi antara KPPN dengan satuan kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Dari uji hipotesis (Tabel 4.19) dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara KPPN dengan satuan kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung variabel KMN lebih kecil daripada t tabel ($0,740 < 1,995$) dan nilai signifikan t lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,462 sehingga hipotesis H_3 tidak didukung.

4.7.4 Pengujian Hipotesis 4

Pengujian hipotesis IV bertujuan untuk menguji apakah organisasi tim (ORG) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (KUAL). Rumusan hipotesis 4 adalah sebagai berikut :

H_4 : Organisasi tim berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Dari uji hipotesis (Tabel 4.19) dapat disimpulkan bahwa organisasi tim berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t

hitung variabel ORG lebih besar daripada t tabel ($2,248 > 1,995$) dan nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,028 sehingga hipotesis H_4 didukung.

4.7.5 Pengujian Hipotesis 5

Pengujian hipotesis 5 bertujuan untuk menguji apakah sarana pendukung (SRN) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (KUAL). Rumusan hipotesis 5 adalah sebagai berikut :

H_5 : Sarana pendukung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Dari uji hipotesis (Tabel 4.19) dapat disimpulkan bahwa sarana pendukung tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung variabel SRN lebih kecil daripada t tabel ($0,434 < 1,995$) dan nilai signifikan t lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,666 sehingga hipotesis H_5 tidak didukung.

4.8 Model Regresi yang Terbentuk

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 4.19 model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$KUAL = 84,480 + 1,850SDM + 1,108ATR + 0,583KMN + 1,205ORG + 0,369SRN + e$$

dimana :

KUAL : Kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga

SDM : Kemampuan sumber daya manusia

ATR : Aturan hukum

KMN : Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja

ORG : Organisasi tim

SRN : Sarana pendukung

e : kesalahan pengganggu (*standard error*)

Dari model regresi yang terbentuk, dapat diketahui bahwa variabel dependen (KUAL) adalah konstanta regresi bernilai 84,480 dan nilai beta untuk semua model menunjukkan nilai positif. Hal ini berarti hubungan antara variabel bebas dan terikat memiliki hubungan yang searah.

4.9 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan organisasi tim (ORG) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (KUAL), sedangkan variabel aturan hukum (ATR), komunikasi antara KPPN dengan satuan kerja (KMN), dan sarana pendukung (SRN) tidak berpengaruh. Kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebesar 44,3% dipengaruhi oleh variabel tersebut sedangkan 55,7% dipengaruhi oleh variabel lain.

Dari tabel 4.19 dapat kita lihat meskipun kemampuan sumber daya manusia, aturan hukum, komunikasi antara KPPN dengan satuan kerja, organisasi tim, dan sarana pendukung memiliki hubungan yang positif terhadap kualitas laporan keuangan, masing-masing variabel memiliki kekuatan pengaruh yang berbeda-beda. Berikut ini penjelasan untuk masing-masing variabel berdasar uji hipotesis yang dilakukan.

4.9.1 Kemampuan Sumber Daya Manusia

Kemampuan sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam setiap pelaksanaan kegiatan organisasi, termasuk dalam penyusunan laporan

keuangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hariandja (2002) dalam Mahardika (2011) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia menjadi kunci utama pelaksanaan kegiatan dan menentukan tercapai tidaknya tujuan dan sasaran organisasi. Warisno (2009) juga menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan bahwa sumber daya manusia ini dikelola sebaik mungkin sehingga akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

Penelitian ini berhasil menemukan bukti adanya pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Choirunisah (2009) pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Malang, yang juga menemukan bukti empiris adanya pengaruh kemampuan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan instansi. Di lingkup pemerintah daerah, Azhar (2007), Warisno (2009), dan Mahardika (2011) juga menemukan bukti yang tidak jauh berbeda mengenai pengaruh sumber daya manusia terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah. Hal ini dapat dipahami mengingat manusia adalah pihak yang melaksanakan setiap aktivitas dalam organisasi. Baik buruknya kualitas hasil pekerjaan yang diperoleh ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya.

Oleh karena itu, penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikannya, yaitu pegawai yang berlatar belakang pendidikan ekonomi akuntansi sebagai staf penyusun laporan keuangan akan menjadikan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Hal ini didukung Hutagalung (2006) dan Hartina (2009) yang

menemukan bukti bahwa staf penyusun laporan keuangan yang berlatar belakang pendidikan non ekonomi mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena pengetahuan yang dimiliki tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya.

4.9.2 Aturan Hukum

Penelitian ini tidak mampu menemukan bukti adanya pengaruh aturan hukum terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini mendukung penelitian Azhar (2007) yang juga menemukan bukti bahwa faktor peraturan tidak mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun, hal ini tidak konsisten dengan konsep yang menyatakan bahwa aturan penyusunan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, sebagaimana Mahardika (2011) yang menemukan bukti adanya pengaruh peraturan terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan.

Hasil yang berbeda tersebut dapat terjadi karena dalam sebuah aturan, perlu dipertimbangkan pula bagaimana pemberlakuan sanksi atas pelanggarannya. Ketika suatu aturan dibuat namun sanksi pelanggaran tidak diberlakukan dengan tegas, maka aturan hanya akan menjadi simbol atau formalitas saja dan tidak akan mendorong seseorang untuk mematuhi aturan tersebut.

Sebagai contoh, dalam hal batas waktu penyampaian laporan keuangan satuan kerja ke KPPN. Disebutkan dalam peraturan bahwa penyampaian laporan keuangan selambat-lambatnya tujuh hari kerja pada bulan berikutnya setelah periode pelaporan. Sebagian responden beranggapan bahwa sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut tidak diberlakukan dengan tegas. Hal ini diperkuat dengan data ketepatan waktu penyampaian laporan

keuangan, yang di dalamnya masih terdapat satuan kerja yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Padahal sanksi keterlambatan ini jelas, yakni akan dikenakan penundaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran satuan kerja tersebut (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-19/PB/2008). Jika SP2D tertunda penerbitannya, maka akan menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan. Sanksi ini seharusnya membuat ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi satuan kerja. Namun pada kenyataannya masih ada satuan kerja yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan menjadikan aturan hukum dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, yang salah satunya diproksikan dengan ketepatan waktu.

4.9.3 Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja

Penelitian ini tidak mampu menemukan bukti adanya pengaruh komunikasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Warisno (2009) yang menemukan bukti bahwa komunikasi berpengaruh terhadap kinerja SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah.

Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan fokus penelitian. Penelitian Warisno (2009), lebih difokuskan pada kinerja pengelolaan keuangan SKPD secara keseluruhan, yakni sejak anggaran disusun sampai dengan penyampaian laporan keuangan, sehingga komunikasi internal organisasi lebih diutamakan. Sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada kualitas laporan keuangan satuan kerja sebagai komponen LKPP yang disusun di tingkat KPPN

sehingga tipe komunikasi yang dibahas lebih pada komunikasi eksternal organisasi, yakni antara satuan kerja dengan KPPN.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh komunikasi antara KPPN dan satuan kerja terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mungkin terjadi karena penelitian ini tidak mempertimbangkan aspek pembinaan secara intern dari pihak Kementerian Negara/Lembaga terhadap unit-unit akuntansi di bawahnya sehingga tidak optimal dalam mengidentifikasi adanya pengaruh komunikasi terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

4.9.4 Organisasi Tim

Tujuan organisasi tim dalam penyusunan laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang ditunjuk mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Konsep tersebut diperkuat dengan hasil temuan penelitian ini, yaitu organisasi tim berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Hal ini juga konsisten dengan penelitian Choirunisah (2009) yang menemukan bukti adanya pengaruh organisasi tim terhadap kualitas laporan keuangan. Adanya formalisasi tim penyusun laporan keuangan, pembagian tugas yang jelas, serta koordinasi yang baik dari atasan dalam penyelesaian masalah terkait penyusunan laporan keuangan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

4.9.5 Sarana Pendukung

Penelitian ini tidak mampu menemukan bukti adanya pengaruh sarana pendukung terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Hal ini tidak konsisten dengan konsep yang menyatakan bahwa semakin memadai perangkat keras dan aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, sebagaimana Azhar (2007) dan Mahardika (2011) yang menemukan bukti bahwa sarana pendukung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Namun, beberapa peneliti lain menemukan bukti empiris yang tidak jauh berbeda dengan penelitian ini. Salah satunya adalah Choirunisah (2009) yang menemukan bukti bahwa dukungan alat tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Warisno (2009) dalam penelitiannya juga mendapati bahwa sarana pendukung tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD dalam mengelola keuangannya. Hal ini mungkin terjadi karena pada dasarnya sarana pendukung hanyalah sebuah alat yang tetap memerlukan peran manusia untuk menjalankannya. Optimal atau tidaknya penggunaan sarana pendukung dalam penyelesaian pekerjaan bergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

Senada dengan hal tersebut, Hutagalung (2006) menyatakan bahwa tersedianya sarana pendukung tidak akan ada gunanya jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mampu menggunakannya secara optimal. Oleh karena itu, dapat dipahami mengapa sarana pendukung dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Semua bergantung pada operatornya, apakah benar-benar memahami penggunaan sarana pendukung tersebut dengan baik atau tidak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini berhasil menemukan bukti adanya pengaruh variabel kemampuan sumber daya manusia dan organisasi tim terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
2. Penelitian ini tidak mampu menemukan bukti adanya pengaruh variabel aturan hukum, komunikasi antara KPPN dengan satuan kerja, dan sarana pendukung terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
3. Besar koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini adalah 0,443 (44,3%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel kemampuan sumber daya manusia, aturan hukum, komunikasi antara KPPN dengan satuan kerja, organisasi tim, dan sarana pendukung dapat menjelaskan variabel terikatnya yaitu kualitas laporan keuangan sebesar 44,3%, sedangkan sisanya sebesar 55,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Variabel komunikasi dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena hanya membahas komunikasi eksternal satuan kerja.
2. Responden yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Surabaya II.

3. Beberapa instrumen penelitian dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan keterbatasan yang dimiliki.

5.3 Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

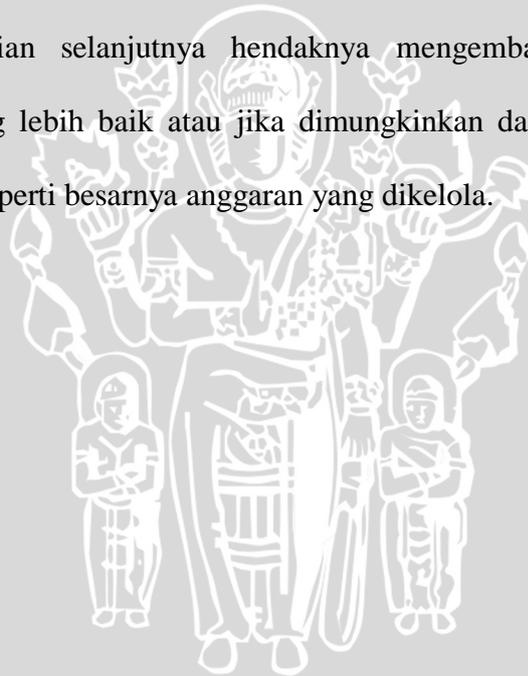
1. Bagi Kementerian Negara/Lembaga, khususnya satuan kerja
 - a. Satuan kerja hendaknya mempertimbangkan latar belakang pendidikan dalam menunjuk staf penyusun laporan keuangan. Jika dimungkinkan, disarankan untuk merekrut pegawai dengan latar belakang pendidikan akuntansi, atau setidaknya ekonomi.
 - b. Satuan kerja sebaiknya melakukan formalisasi pembentukan tim penyusun laporan keuangan sehingga tugas dan tanggung jawab pegawai yang ditunjuk menjadi jelas. Berdasarkan data kuesioner, beberapa satuan kerja belum menentukan pembagian tugas penyusunan laporan keuangan dalam dokumen resmi, sehingga staf dapat merangkap tugas lain, misalnya sebagai bendahara pengeluaran. Hal ini kurang tepat jika dipandang dari sudut pengendalian internal karena fungsi penyimpan kekayaan (bendahara) dan fungsi pencatatan (penyusun laporan keuangan) ditangani oleh orang yang sama.
2. Bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Surabaya II

KPPN Surabaya II hendaknya semakin meningkatkan komunikasi yang efektif dengan satuan kerja, salah satunya dengan memperbaiki saluran komunikasi

yang ada seperti *website* sehingga lebih informatif dan mudah diakses oleh pihak satuan kerja.

3. Bagi penelitian selanjutnya

- a. Sebaiknya untuk variabel komunikasi melibatkan dua tipe komunikasi, yaitu komunikasi internal dan eksternal secara bersama-sama.
- b. Jika dimungkinkan untuk penelitian selanjutnya responden dapat diperluas misalnya menjadi satuan kerja di wilayah kerja KPPN Surabaya I dan II, atau KPPN Se-Jawa Timur sehingga hasil penelitian akan lebih baik lagi.
- c. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya mengembangkan instrumen penelitian yang lebih baik atau jika dimungkinkan dapat menambahkan variabel lain seperti besarnya anggaran yang dikelola.



DAFTAR PUSTAKA

- _____. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- _____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- _____. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2008 tentang Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- _____. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Aritonang, Aldiani Sulani dan Syarief, Firman. 2009. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. *Jurnal Akuntansi 12, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara*. (Online). (<http://akuntansi.usu.ac.id/jurnal-akuntansi-12.html>), diakses tanggal 10 November 2011.
- Azhar. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Tesis*. Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *LKPP 2010 Wajar Dengan Pengecualian*. (Online). (<http://www.bpk.go.id/web/?p=8685>), diakses tanggal 25 September 2011.
- Bisnis Indonesia. 2011, 20 September. *Keuangan Negara Belum Memuaskan*. (Online). (<http://www.bpk.go.id/web/?p=9872>), diakses tanggal 25 September 2011.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana Predana Media Grup.

- Choirunisah, Fariziah. 2009. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Malang Tahun 2008). Tesis. Yogyakarta : Magister Akuntansi Universitas Gajah Mada.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2011. Manual Indikator Kinerja Utama Seksi Verifikasi dan Akuntansi pada KPPN. (Online). (<http://www.perbendaharaan.go.id>), diakses tanggal 10 Agustus 2011.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartina, Silka. 2009. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat. Skripsi. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Hutagalung, Endang Basaria. 2006. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Keterlambatan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD pada Pemerintah Kota Sibolga. Skripsi. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.
- Jogiyanto. 2008. *Pedoman Survei Kuesioner : Mengembangkan Kuesioner, Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon*. Yogyakarta : BPFE.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahardika, Nur Fakhru. 2011. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Motivasi, Pelatihan, Peraturan, dan Sarana Pendukung terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Pemerintah Kota Malang. Skripsi. Malang : Universitas Brawijaya.
- Nazier, Daeng. 2009. Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan. *Makalah Seminar Nasional*.
- Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh, Imam. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. 13*
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*. Cetakan Kedua. Jakarta : Balai Pustaka.

Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi Ke-10. Terjemahan Drs. Benyamin Molan. Jakarta : PT Indeks.

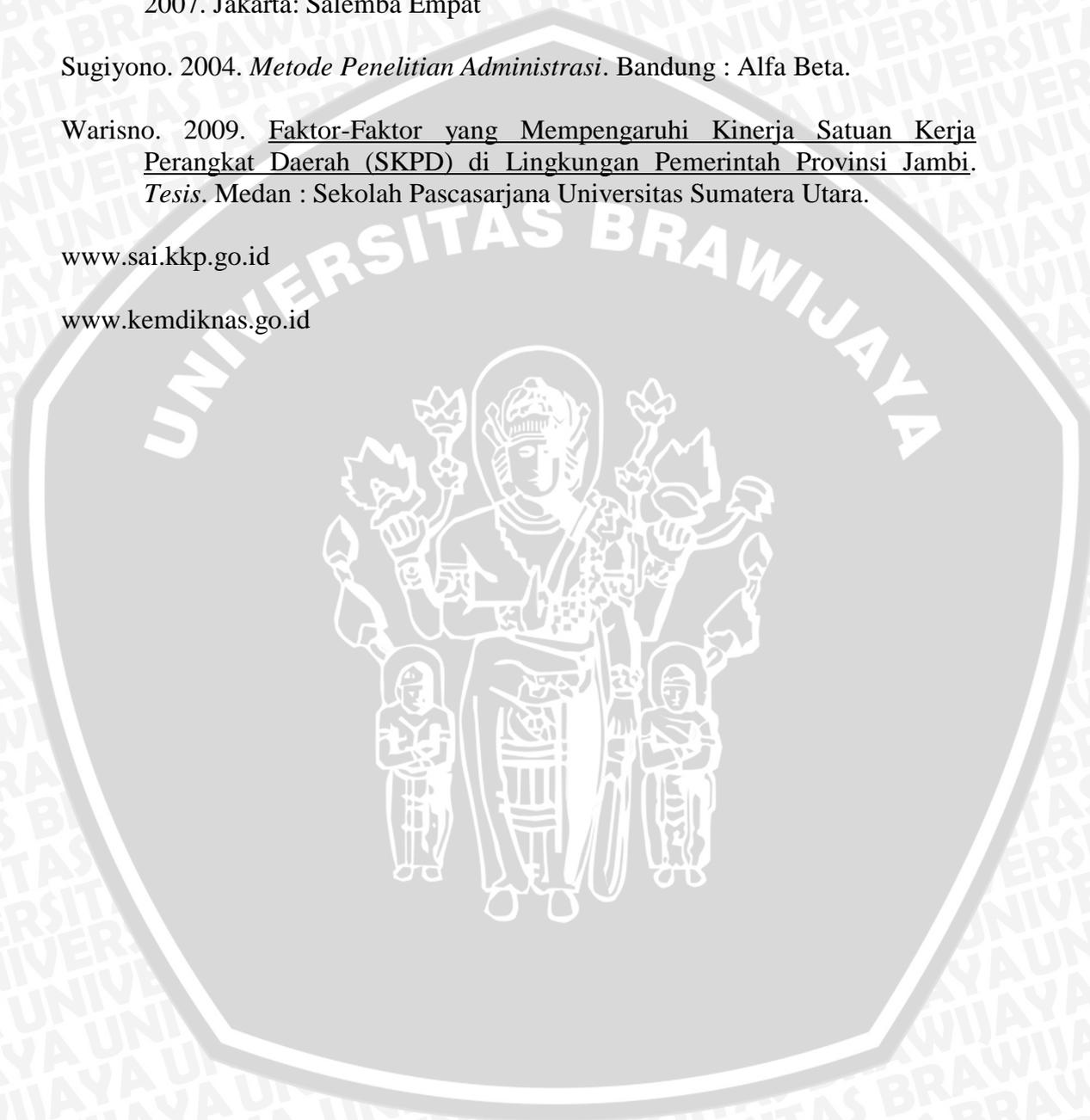
Sekaran, Uma. 2003. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Terjemahan Yon, Kwan. 2007. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfa Beta.

Warisno. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Tesis. Medan : Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

www.sai.kkp.go.id

www.kemdiknas.go.id



Lampiran 1 Daftar Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Surabaya II

No	Kode	Nama Satker	Kode Kewenangan	Jumlah DIPA
	005	Mahkamah Agung		
1	098104	Pengadilan Tinggi Surabaya	KD	2
2	098111	Pengadilan Negeri Surabaya	KD	2
3	098150	Pengadilan Negeri Gresik	KD	2
4	308170	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	KD	2
5	401240	Pengadilan Agama Surabaya	KD	2
6	401287	Pengadilan Agama Bawean	KD	2
7	401293	Pengadilan Agama Gresik	KD	2
8	548940	Pengadilan Tinggi TUN Sby	KD	2
9	663300	Pengadilan Militer Tinggi III di Sby	KD	2
10	663314	Pengadilan Militer III-12 di Sby	KD	2
	010	Dalam Negeri		
11	050098	Bappeda Prov. Jatim	DK	1
12	055001	Setda Prov Jatim	DK	1
13	050012	Badan Pemberdayaan Masy. Prov Jatim	DK	1
14	050145	Badan Pemberdayaan Masy. Kab. Gresik TP	TP	1
15	050145	Badan Pemberdayaan Masy. Kab. Gresik UB	UB	1
16	050045	Disnakertransduk Prov Jatim	DK	1
	012	Pertahanan		
17	639953	Mabes TNI Rayon Jatim	KP	1
18	639960	Gabrah 39	KP	1
19	639974	Gabrah 40	KP	1
20	639981	Gabrah 41	KP	1
21	639241	Pusdik Kohanudnas	KP	1
	013	Hukum dan HAM		
22	097268	Balai Harta Peninggalan Surabaya	KD	1
23	408751	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sby	KD	1
24	408952	Kantor Imigrasi Tanjung Perak	KD	1
25	567868	Rumah Tahanan Negara Gresik	KD	1
26	664632	Rumah Detensi Imigrasi Sby	KD	1
	018	Pertanian		
27	050004	Dinas Pertanian Prov. Jatim DK	DK	5
28	050004	Dinas Pertanian Prov. Jatim TP	TP	2
29	050075	UPT Proteksi TPH Prov Jatim	DK	2
30	050076	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH Prov Jatim	DK	2
31	050132	Distanbunhut Gresik	TP	3

No	Kode	Nama Satker	Kode Kewenangan	Jumlah DIPA
32	050068	Dinas Perkebunan Prov Jatim DK	DK	3
33	050068	Dinas Perkebunan Prov Jatim TP	TP	2
34	050044	Dinas Peternakan Prov. Jatim DK	DK	3
35	050044	Dinas Peternakan Prov. Jatim TP	TP	2
36	237551	Pusat Veterinaria Farma Sby	KD	1
37	050055	Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim DK	DK	1
38	050055	Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim TP	TP	1
39	237483	Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya	KD	1
40	567371	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan	KD	1
	019	Perindustrian		
41	248958	Balai Diklat Industri Sby	KD	1
42	050050	Disperindag Jatim	DK	2
43	247211	Baristand Industri Sby	KD	1
	020	Energi dan Sumber Daya Mineral		
44	050010	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Jatim	DK	1
45	447095	Listrik Pedesaan Jatim	KP	1
	022	Perhubungan		
46	466756	Pengembangan LLAJ Jatim	KP	1
47	467082	Pengembangan LLASDP Jatim	KP	1
48	412891	Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak	KD	1
49	412905	Administrator Pelabuhan Gresik	KD	1
50	412951	Distrik Navigasi Surabaya	KD	1
51	413428	Syahbandar Pelabuhan Tanjung Perak	KD	1
52	413689	Unit Penyelenggara Pelabuhan Bawean	KD	1
53	535841	Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Sby	KD	1
54	449494	Bandar Udara Bawean	KD	1
55	467431	Pengembangan Perkeretaapian Jatim	KP	1
56	526181	Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Sby	KP	1
57	531954	Balai Diklat Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sby	KP	1
	024	Kesehatan		
58	050009	Dinas Kesehatan Prov Jatim	DK	6
59	050143	Dinas Kesehatan Kab. Gresik	TP	1
60	055103	Dinas Kesehatan Kota Sby	TP	1
61	050128	RSU Gresik	TP	1
62	055108	RSU Dr Soetomo Sby	TP	1
63	415602	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Sby	KD	1
64	552713	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Sby	KD	1
65	416120	Kantor Kesehatan Pelabuhan Sby	KD	1

No	Kode	Nama Satker	Kode Kewenangan	Jumlah DIPA
66	560127	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular Sby	KD	1
67	416202	Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	KD	1
68	637588	Politeknik Kesehatan Sby	KD	1
	025	Agama		
69	425381	Balai Diklat Keagamaan Sby	KD	1
70	423770	IAIN Sunan Ampel	KD	1
71	417822	Kantor Kementerian Agama Kab. Gresik	KD	6
72	417816	Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	KD	6
73	598986	MAN 2 Gresik	KD	1
74	425840	MAN Gresik	KD	1
75	423843	MAN Surabaya	KD	1
76	602616	MIN Jambangan Kota Sby	KD	1
77	603032	MIN Kedamean Gresik	KD	1
78	603049	MIN Kedungsekar Gresik	KD	1
79	602602	MIN Medokan Ayu Kota Sby	KD	1
80	425721	MTsN Gresik	KD	1
81	573603	MTsN Rungkut Kota Sby	KD	1
82	425715	MTsN Surabaya I	KD	1
83	425777	MTsN Surabaya II	KD	1
84	605508	MTsN Surabaya III	KD	1
	027	Sosial		
85	050029	Dinas Sosial Prov Jatim	DK	4
86	050029	Dinas Sosial Prov Jatim TP	TP	2
	032	Kelautan dan Perikanan		
87	050064	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jatim DK	DK	6
88	050064	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jatim TP	TP	3
89	427542	Balai Karantina Ikan Kelas I Juanda	KD	1
90	050139	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gresik	TP	2
91	649788	Balai Karantina Ikan Kelas II Tanjung Perak	KD	1
92	055122	Dinas Pertanian Kota Sby	TP	2
	059	Komunikasi dan Informasi		
93	613413	Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Sby	KD	1
	060	POLRI		
94	644030	Bid Dokkes Polda Jatim	KD	1
95	644023	Bid Keu Polda Jatim	KD	1
96	651114	Bid Propam Polda Jatim	KD	1
97	651121	Bid Telematika Polda Jatim/TI	KD	1

No	Kode	Nama Satker	Kode Kewenangan	Jumlah DIPA
98	676630	Dit Binmas Polda Jatim	KD	1
99	643916	Dit Intelkam Polda Jatim	KD	1
100	643941	Dit Lantas Polda Jatim	KD	1
101	644019	Dit Polair Polda Jatim	KD	1
102	678647	Dit Reskrimsus Polda Jatim	KD	1
103	643920	Dit Reskrimum Polda Jatim	KD	1
104	651177	Dit Resnarkoba Polda Jatim	KD	1
105	643937	Dit Sabhara Polda Jatim	KD	1
106	678612	Itwasda Polda Jatim	KD	1
107	644051	Labfor Cabang Sby	KD	1
108	644459	Polres Gresik	KD	1
109	644491	Polres Pelabuhan Tanjung Perak	KD	1
110	644065	Polrestabes Surabaya	KD	1
111	643894	Ro Ops Polda Jatim	KD	1
112	678626	Ro Rena Polda Jatim	KD	1
113	643990	Ro Sarpras Polda Jatim	KD	1
114	643962	Ro SDM Polda Jatim	KD	1
115	651135	RS Bhayangkara Sby	KD	1
116	644002	Sat Brimob Polda Jatim	KD	1
117	643880	SPRIPIM Polda Jatim	KD	1
118	643902	Yanma Polda Jatim	KD	1
	063	Badan POM		
119	432784	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Sby	KD	1
	075	Badan Meteorologi dan Geofisika		
120	436905	Stamet Sangkapura Bawean	KD	1
121	289005	Stamet Maritim Perak II Sby	KD	1
122	436885	Stamet Perak I Sby	KD	1
	090	Perdagangan		
123	050046	Disperindag dan Koperasi Prov Jatim	DK	5
	999	Belanja Lain-Lain		
124	983371	RRI Sby	KP	1
125	999142	TVRI Stasiun Sby	KP	1
		Total		183

Keterangan :

KP = Kantor Pusat, KD = Kantor Daerah, DK = Dekonsentrasi, TP = Tugas Pembantuan,
UB = Urusan Bersama, DIPA = Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

IDENTITAS RESPONDEN

Silakan mengisi dan memberi tanda silang pada kotak yang telah disediakan.

Nama :

Nama satuan kerja :

Jenis Kelamin : Laki laki Perempuan

Pendidikan terakhir : SMA/SMK Jurusan.....

Diploma (D1/D3) Jurusan.....

Sarjana (S1) Jurusan.....

Pascasarjana (S2) Jurusan.....

Jabatan/Posisi :

Lama menduduki jabatan/posisi : ≤ 1 tahun >1 - 3 tahun > 3 tahun

Jumlah pelatihan/sosialisasi yang pernah diikuti selama menduduki jabatan/posisi:

Belum pernah 1 kali 2 kali 3 kali > 3 kali

LEMBAR KUESIONER

Petunjuk :

Beri tanda (X) pada kolom yang paling sesuai menggambarkan pendapat Bapak/Ibu terhadap pernyataan-pernyataan berikut.

- Keterangan :
- STS = sangat tidak setuju
 - TS = tidak setuju
 - N = netral
 - S = setuju
 - SS = sangat setuju

I. KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA

PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1. Penempatan pegawai pada bidang pekerjaan/posisi tertentu telah sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya					
2. Setiap pegawai yang ditempatkan memahami uraian pekerjaannya (<i>job description</i>)					
3. Semua materi pelatihan dan sosialisasi terkait penyusunan laporan keuangan sangat mudah dipahami					



PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
4. Pegawai dapat mengoperasikan aplikasi penyusunan laporan keuangan secara optimal sesuai cara kerja dan fungsi aplikasi tersebut					
5. Setiap permasalahan terkait aplikasi dapat diselesaikan dengan mudah oleh pegawai					

II. ATURAN HUKUM

Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1. Peraturan yang ada dapat mengarahkan para pegawai melakukan pekerjaannya dengan baik					
2. Peraturan yang ada terkait penyusunan laporan keuangan mudah dipahami oleh para pegawai					
3. Peraturan yang ada telah dipatuhi para pegawai sebagaimana mestinya					
4. Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku					
5. Pemberlakuan sanksi yang tegas telah diterapkan atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan					

Petunjuk untuk bagian selanjutnya :

Dalam skala 1 s.d. 5 beri tanda (X) pada kotak yang menurut Bapak/Ibu paling tepat menggambarkan kondisi di kantor Bapak/Ibu

III. KOMUNIKASI ANTARA KPPN DENGAN SATUAN KERJA

1. Apakah informasi penting dan terbaru mudah diakses/didapatkan dari KPPN ?

1	2	3	4	5
Sangat sulit			Sangat mudah	

2. Bagaimana kualitas layanan konsultasi yang disediakan oleh KPPN ?

1	2	3	4	5
Sangat buruk			Sangat baik	

3. Bagaimana tingkat kecepatan penyampaian informasi penting oleh KPPN?

1	2	3	4	5
Sangat lamban			Sangat cepat	

4. Apakah saluran komunikasi dengan KPPN, seperti email dan website, efektif digunakan sebagai media konsultasi atas permasalahan yang ditemui ?

1	2	3	4	5
Sangat tidak efektif			Sangat efektif	

5. Apakah informasi yang diberikan KPPN terkait proses penyusunan laporan keuangan mudah dipahami ?

1	2	3	4	5
Sangat sulit dipahami			Sangat mudah dipahami	

IV. ORGANISASI TIM

1. Apakah semua nama pegawai yang bertugas menyusun laporan keuangan ditetapkan dalam dokumen resmi (misalnya melalui surat keputusan kepala kantor) ?

1	2	3	4	5
Tidak, tidak ada			Ya, semua pegawai	

2. Bagaimana pembagian tugas di antara petugas penyusun laporan keuangan ?

1	2	3	4	5
Sangat tidak jelas			Sangat jelas	

3. Apakah semua pegawai penyusun laporan keuangan menjalankan tugasnya masing-masing secara konsisten?

1	2	3	4	5
Tidak, tidak ada			Ya, semua pegawai	

4. Bagaimana efektivitas pembagian tugas dalam tim penyusun laporan keuangan?

1	2	3	4	5
Sangat tidak efektif			Sangat efektif	

5. Bagaimana koordinasi atasan dalam pemecahan masalah yang ditemui pegawai ?

1	2	3	4	5
Sangat tidak memadai			Sangat memadai	

V. SARANA PENDUKUNG

1. Apakah jumlah komputer dan sarana pendukung pekerjaan lainnya telah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian pekerjaan di kantor?

1	2	3	4	5
Sangat tidak sesuai			Sangat sesuai	

2. Apakah spesifikasi komputer dan sarana penunjang pekerjaan lainnya telah memadai untuk penyelesaian tugas secara optimal?

1	2	3	4	5
Tidak memadai			Sangat memadai	

3. Apakah aplikasi yang tersedia mudah untuk dioperasikan oleh pegawai?

1	2	3	4	5
Sangat sulit			Sangat mudah	

4. Sejauh mana peran komputer, aplikasi dan sarana lainnya terhadap peningkatan kualitas hasil pekerjaan Bapak/ Ibu?

1	2	3	4	5
Tidak mendukung			Sangat mendukung	

5. Apakah *software*/program komputer dan aplikasi penyusunan laporan keuangan selalu dipantau dan segera diperbaharui sesuai tingkat kebutuhan secara berkala?

1	2	3	4	5
Tidak, tidak pernah				Iya, selalu

Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak/Ibu atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu sejenak untuk memberikan tanggapan atas pernyataan dan pertanyaan di atas.

Lampiran 3 Hasil Uji Instrumen Penelitian (Uji Pilot)

A. Uji Validitas

Correlations

		SDM01	SDM02	SDM03	SDM04	SDM05	SDM
SDM01	Pearson Correlation	1	.584(**)	.434(*)	.329	.000	.793(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.001	.017	.075	1.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
SDM02	Pearson Correlation	.584(**)	1	.242	.282	.086	.754(**)
	Sig. (2-tailed)	.001	.	.197	.130	.652	.000
	N	30	30	30	30	30	30
SDM03	Pearson Correlation	.434(*)	.242	1	.542(**)	-.059	.669(**)
	Sig. (2-tailed)	.017	.197	.	.002	.756	.000
	N	30	30	30	30	30	30
SDM04	Pearson Correlation	.329	.282	.542(**)	1	-.052	.665(**)
	Sig. (2-tailed)	.075	.130	.002	.	.784	.000
	N	30	30	30	30	30	30
SDM05	Pearson Correlation	.000	.086	-.059	-.052	1	.225
	Sig. (2-tailed)	1.000	.652	.756	.784	.	.233
	N	30	30	30	30	30	30
SDM	Pearson Correlation	.793(**)	.754(**)	.669(**)	.665(**)	.225	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.233	.
	N	30	30	30	30	30	30

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		ATR01	ATR02	ATR03	ATR04	ATR05	ATR
ATR01	Pearson Correlation	1	.233	.345	.306	.563(**)	.677(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.214	.062	.100	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30
ATR02	Pearson Correlation	.233	1	.375(*)	.049	.063	.559(**)
	Sig. (2-tailed)	.214	.	.041	.799	.740	.001
	N	30	30	30	30	30	30
ATR03	Pearson Correlation	.345	.375(*)	1	.518(**)	.524(**)	.807(**)
	Sig. (2-tailed)	.062	.041	.	.003	.003	.000
	N	30	30	30	30	30	30
ATR04	Pearson Correlation	.306	.049	.518(**)	1	.704(**)	.688(**)
	Sig. (2-tailed)	.100	.799	.003	.	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
ATR05	Pearson Correlation	.563(**)	.063	.524(**)	.704(**)	1	.770(**)
	Sig. (2-tailed)	.001	.740	.003	.000	.	.000
	N	30	30	30	30	30	30
ATR	Pearson Correlation	.677(**)	.559(**)	.807(**)	.688(**)	.770(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	.
	N	30	30	30	30	30	30

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Correlations

		KMN01	KMN02	KMN03	KMN04	KMN05	KMN
KMN01	Pearson Correlation	1	.240	.210	.246	.689(**)	.682(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.201	.265	.190	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
KMN02	Pearson Correlation	.240	1	.612(**)	.458(*)	.271	.690(**)
	Sig. (2-tailed)	.201	.	.000	.011	.148	.000
	N	30	30	30	30	30	30
KMN03	Pearson Correlation	.210	.612(**)	1	.549(**)	.379(*)	.738(**)
	Sig. (2-tailed)	.265	.000	.	.002	.039	.000
	N	30	30	30	30	30	30
KMN04	Pearson Correlation	.246	.458(*)	.549(**)	1	.451(*)	.741(**)
	Sig. (2-tailed)	.190	.011	.002	.	.012	.000
	N	30	30	30	30	30	30
KMN05	Pearson Correlation	.689(**)	.271	.379(*)	.451(*)	1	.780(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.148	.039	.012	.	.000
	N	30	30	30	30	30	30
KMN	Pearson Correlation	.682(**)	.690(**)	.738(**)	.741(**)	.780(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.
	N	30	30	30	30	30	30

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		ORG01	ORG02	ORG03	ORG04	ORG05	ORG
ORG01	Pearson Correlation	1	.752(**)	.459(*)	.581(**)	.628(**)	.787(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.011	.001	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
ORG02	Pearson Correlation	.752(**)	1	.712(**)	.712(**)	.617(**)	.886(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
ORG03	Pearson Correlation	.459(*)	.712(**)	1	.849(**)	.590(**)	.860(**)
	Sig. (2-tailed)	.011	.000	.	.000	.001	.000
	N	30	30	30	30	30	30
ORG04	Pearson Correlation	.581(**)	.712(**)	.849(**)	1	.657(**)	.900(**)
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
ORG05	Pearson Correlation	.628(**)	.617(**)	.590(**)	.657(**)	1	.821(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.	.000
	N	30	30	30	30	30	30
ORG	Pearson Correlation	.787(**)	.886(**)	.860(**)	.900(**)	.821(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.
	N	30	30	30	30	30	30

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

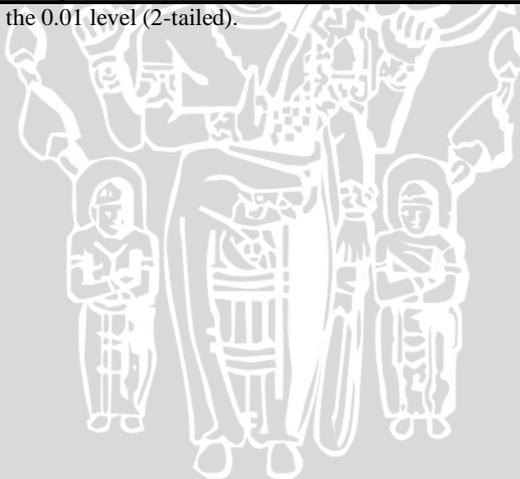
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Correlations

		SRN01	SRN02	SRN03	SRN04	SRN05	SRN
SRN01	Pearson Correlation	1	.952(**)	.704(**)	.210	.138	.888(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.264	.466	.000
	N	30	30	30	30	30	30
SRN02	Pearson Correlation	.952(**)	1	.776(**)	.138	.090	.885(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.468	.636	.000
	N	30	30	30	30	30	30
SRN03	Pearson Correlation	.704(**)	.776(**)	1	.046	.116	.805(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.808	.543	.000
	N	30	30	30	30	30	30
SRN04	Pearson Correlation	.210	.138	.046	1	.708(**)	.478(**)
	Sig. (2-tailed)	.264	.468	.808	.	.000	.008
	N	30	30	30	30	30	30
SRN05	Pearson Correlation	.138	.090	.116	.708(**)	1	.482(**)
	Sig. (2-tailed)	.466	.636	.543	.000	.	.007
	N	30	30	30	30	30	30
SRN	Pearson Correlation	.888(**)	.885(**)	.805(**)	.478(**)	.482(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.008	.007	.
	N	30	30	30	30	30	30

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



B. Uji Reliabilitas

Variabel Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.644	5

Variabel Aturan Hukum (ATR)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.724	5

Variabel Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja (KMN)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.773	5

Variabel Organisasi Tim (ORG)

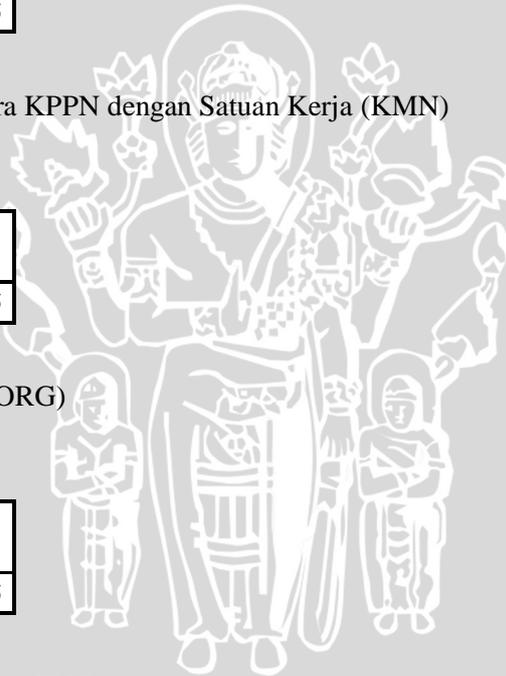
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.904	5

Variabel Sarana Pendukung (SRN)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.775	5



Lampiran 4 Hasil Uji Kualitas Data

A. Uji Validitas

Correlations

		SDM01	SDM02	SDM03	SDM04	SDM05	SDM
SDM01	Pearson Correlation	1	.600(**)	.329(**)	.490(**)	.349(**)	.769(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.004	.000	.002	.000
	N	75	75	75	75	75	75
SDM02	Pearson Correlation	.600(**)	1	.367(**)	.603(**)	.523(**)	.829(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.001	.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75
SDM03	Pearson Correlation	.329(**)	.367(**)	1	.475(**)	.384(**)	.653(**)
	Sig. (2-tailed)	.004	.001	.	.000	.001	.000
	N	75	75	75	75	75	75
SDM04	Pearson Correlation	.490(**)	.603(**)	.475(**)	1	.578(**)	.796(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75
SDM05	Pearson Correlation	.349(**)	.523(**)	.384(**)	.578(**)	1	.737(**)
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.001	.000	.	.000
	N	75	75	75	75	75	75
SDM	Pearson Correlation	.769(**)	.829(**)	.653(**)	.796(**)	.737(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.
	N	75	75	75	75	75	75

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		ATR01	ATR02	ATR03	ATR04	ATR05	ATR
ATR01	Pearson Correlation	1	.332(**)	.291(*)	.461(**)	.198	.709(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.004	.011	.000	.088	.000
	N	75	75	75	75	75	75
ATR02	Pearson Correlation	.332(**)	1	.195	.132	.046	.546(**)
	Sig. (2-tailed)	.004	.	.093	.260	.692	.000
	N	75	75	75	75	75	75
ATR03	Pearson Correlation	.291(*)	.195	1	.345(**)	.376(**)	.672(**)
	Sig. (2-tailed)	.011	.093	.	.002	.001	.000
	N	75	75	75	75	75	75
ATR04	Pearson Correlation	.461(**)	.132	.345(**)	1	.503(**)	.718(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.260	.002	.	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75
ATR05	Pearson Correlation	.198	.046	.376(**)	.503(**)	1	.633(**)
	Sig. (2-tailed)	.088	.692	.001	.000	.	.000
	N	75	75	75	75	75	75
ATR	Pearson Correlation	.709(**)	.546(**)	.672(**)	.718(**)	.633(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.
	N	75	75	75	75	75	75

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		KMN01	KMN02	KMN03	KMN04	KMN05	KMN
KMN01	Pearson Correlation	1	.386(**)	.408(**)	.348(**)	.337(**)	.720(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.001	.000	.002	.003	.000
	N	75	75	75	75	75	75
KMN02	Pearson Correlation	.386(**)	1	.495(**)	.288(*)	.589(**)	.742(**)
	Sig. (2-tailed)	.001	.	.000	.012	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75
KMN03	Pearson Correlation	.408(**)	.495(**)	1	.100	.564(**)	.682(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.391	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75
KMN04	Pearson Correlation	.348(**)	.288(*)	.100	1	.382(**)	.647(**)
	Sig. (2-tailed)	.002	.012	.391	.	.001	.000
	N	75	75	75	75	75	75
KMN05	Pearson Correlation	.337(**)	.589(**)	.564(**)	.382(**)	1	.773(**)
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	.001	.	.000
	N	75	75	75	75	75	75
KMN	Pearson Correlation	.720(**)	.742(**)	.682(**)	.647(**)	.773(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.
	N	75	75	75	75	75	75

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		ORG01	ORG02	ORG03	ORG04	ORG05	ORG
ORG01	Pearson Correlation	1	.583(**)	.544(**)	.533(**)	.550(**)	.772(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75
ORG02	Pearson Correlation	.583(**)	1	.719(**)	.747(**)	.722(**)	.889(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75
ORG03	Pearson Correlation	.544(**)	.719(**)	1	.707(**)	.637(**)	.841(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.000	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75
ORG04	Pearson Correlation	.533(**)	.747(**)	.707(**)	1	.659(**)	.855(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75
ORG05	Pearson Correlation	.550(**)	.722(**)	.637(**)	.659(**)	1	.843(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.	.000
	N	75	75	75	75	75	75
ORG	Pearson Correlation	.772(**)	.889(**)	.841(**)	.855(**)	.843(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.
	N	75	75	75	75	75	75

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

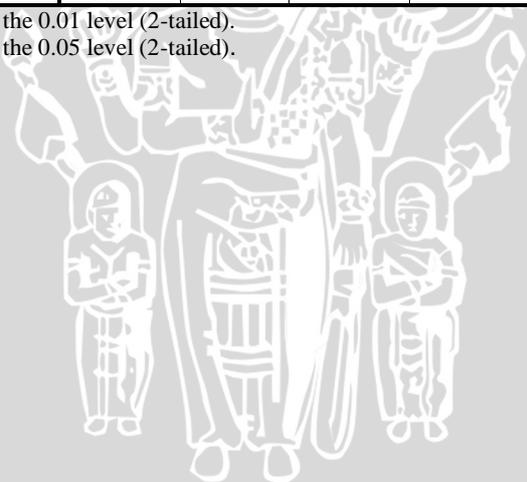


Correlations

		SRN01	SRN02	SRN03	SRN04	SRN05	SRN
SRN01	Pearson Correlation	1	.735(**)	.421(**)	.414(**)	.372(**)	.816(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.000	.001	.000
	N	75	75	75	75	75	75
SRN02	Pearson Correlation	.735(**)	1	.622(**)	.345(**)	.264(*)	.814(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.002	.022	.000
	N	75	75	75	75	75	75
SRN03	Pearson Correlation	.421(**)	.622(**)	1	.540(**)	.361(**)	.754(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.000	.001	.000
	N	75	75	75	75	75	75
SRN04	Pearson Correlation	.414(**)	.345(**)	.540(**)	1	.589(**)	.724(**)
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.	.000	.000
	N	75	75	75	75	75	75
SRN05	Pearson Correlation	.372(**)	.264(*)	.361(**)	.589(**)	1	.665(**)
	Sig. (2-tailed)	.001	.022	.001	.000	.	.000
	N	75	75	75	75	75	75
SRN	Pearson Correlation	.816(**)	.814(**)	.754(**)	.724(**)	.665(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.
	N	75	75	75	75	75	75

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



B. Uji Reliabilitas

Variabel Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.802	5

Variabel Aturan Hukum (ATR)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.660	5

Variabel Komunikasi antara KPPN dengan Satuan Kerja (KMN)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.740	5

Variabel Organisasi Tim (ORG)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.895	5

Variabel Sarana Pendukung (SRN)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.807	5



Lampiran 5 Hasil Uji Asumsi Klasik

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	13.13044711
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.043
	Negative	-.057
Kolmogorov-Smirnov Z		.490
Asymp. Sig. (2-tailed)		.970

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	84.480	15.371		5.496	.000		
	SDM	1.850	.655	.325	2.825	.006	.609	1.643
	ATR	1.108	1.063	.127	1.042	.301	.542	1.846
	KMN	.583	.788	.096	.740	.462	.481	2.079
	ORG	1.205	.536	.253	2.248	.028	.635	1.575
	SRN	.369	.849	.064	.434	.666	.372	2.685

a Dependent Variable: KUAL

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	38.980	8.148		4.784	.000
	SDM	-.280	.347	-.113	-.808	.422
	ATR	-.739	.564	-.195	-1.311	.194
	KMN	-.186	.418	-.070	-.445	.658
	ORG	.080	.284	.038	.280	.780
	SRN	-.373	.450	-.149	-.829	.410

a Dependent Variable: abresid



Lampiran 6 Hasil Uji Hipotesis

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.665(a)	.443	.402	13.598

a Predictors: (Constant), SRN, SDM, ORG, ATR, KMN

b Dependent Variable: KUAL

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10138.881	5	2027.776	10.967	.000(a)
	Residual	12758.239	69	184.902		
	Total	22897.120	74			

a Predictors: (Constant), SRN, SDM, ORG, ATR, KMN

b Dependent Variable: KUAL

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	84.480	15.371		5.496	.000
	SDM	1.850	.655	.325	2.825	.006
	ATR	1.108	1.063	.127	1.042	.301
	KMN	.583	.788	.096	.740	.462
	ORG	1.205	.536	.253	2.248	.028
	SRN	.369	.849	.064	.434	.666

a Dependent Variable: KUAL